

**GATEKEEPING DALAM MENENTUKAN BERITA POLITIK
(STUDI KEBIJAKAN REDAKSI HARIAN
PALOPO POS)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palopo
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran
Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

**Oleh
Sri Andriani Putri
1901040001**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**GATEKEEPING DALAM MENENTUKAN BERITA POLITIK
(STUDI KEBIJAKAN REDAKSI HARIAN
PALOPO POS)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palopo
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran
Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

**Oleh
Sri Andriani Putri
1901040001**

Pembimbing :

- 1. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.**
- 2. Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Andriani Putri
NIM : 19 0104 0001
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Sri Andriani Putri

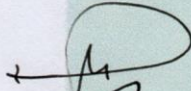
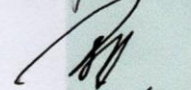


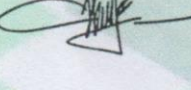
NIM 19 0104 0001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Gatekeeping* dalam Menentukan Berita Politik (Studi Kebijakan Redaksi Harian Palopo Pos)” yang ditulis oleh Sri Andriani Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0104 0001, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan pada Ujian Munaqasyah pada hari Kamis, 02 Oktober 2025 bertepatan dengan 10 Rabi’ul Akhir 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji.

Palopo, 06 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| 1. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Penguji I | () |
| 3. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. | Penguji II | () |
| 4. Wahyuni Husain, S.Sos. M.I.Kom. | Pembimbing I | () |
| 5. Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP 19710512 199903 1 002



Jumriani, S.Sos., M.I.Kom.

NIP 19891020 201903 2 011

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, petunjuk serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Gatekeeping* Dalam Menentukan Berita Politik (Studi Kebijakan Redaksi Harian Palopo Pos)” setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama. Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) melalui program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwa Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Oleh karena itu, penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh arena itu. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Palopo.
2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

3. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom., selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Palopo, Ria Amelinda, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Sekertaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Palopo, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Wahyuni Husain, S. Sos., M.I.Kom. dan Saifur Rahman, S.Fil.I.,M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. dan Jumriani S.Sos., M.I.Kom., selaku penguji I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku kepala unit perpustakaan serta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ikhwan Ibrahim, S.E., Idris Prasetiawan, S.Kel., Arsul S.Pd., selaku Karyawan Harian Palopo Pos yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Drs. H. Firmanza DP, SH, M.Si., selaku Pendukung Eksternal Media Harian Palopo Pos (Pemerintah Kota Palopo/Pj Wali Kota Palopo).
11. Alfri Jamil, S.E., M.Si, selaku Pendukung Eksternal Media Harian Palopo Pos (Tokoh Politik/ Wakil Ketua DPRD Kota Palopo), yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Nasar (Almarhum), penulis mempersembahkan rasa cinta dan rindu kepada Ayah tercinta. Beliau yang telah bekerja keras memperjuangkan penulis, mendidik, serta menjadi ayah terbaik sepanjang masa, meskipun tidak lagi hadir kebersamaan penulis namun atas doa dan semangat beliau tetap hadir dalam diri penulis. Penulis selalu melangitkan doanya agar ayah tenang di surga Allah, semua kebaikan beliau dibalas oleh Allah, semoga beliau bahagia melihat kesuksesan penulis. Hingga akhirnya, penulis mempersembahkan rasa terimakasih tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Jamunia, beliau yang selalu melangitkan doanya untuk penulis dalam setiap proses, mensupport penulis, serta menjadi sumber kekuatan di saat penulis hampir menyerah. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi penulis. Penuh rasa hormat dan cinta kasih maka izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih, semua ini penulis persembahkan untuk beliau.
14. Saudara-saudara penulis, Naria, Sarjum, Irsam, Sriwanti, dan Hajisah, yang selalu memberikan dukungan, baik dalam bentuk semangat, doa, materi maupun bantuan lainnya selama penulis menempuh pendidikan. Dengan

penyuh rasa hormat dan terima kasih, penulis persembahkan pencapaian ini untuknya.

15. Sahabat- sahabat seperjuangan penulis, Wahyuni, Indayanti, Mila, Nurul Azizah Ridwan, S.Sos., Fatmawati, S.sos mereka adalah sahabat-sahabat penulis yang dibentuk dalam bingkai Sahabat Majelis, terimakasih tak terhingga atas segala pengorbanan, kerja sama, dorongan, bantuan, serta doa untuk penulis.
16. Seluruh teman-teman Kelas KPI A dan KPI B yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
17. Keluarga besar Ortom Muhammadiyah Se-Kabupaten Luwu yang telah memberikan banyak pembelajaran berharga kepada penulis.
18. Seluruh teman-teman Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Luwu yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
19. Terimakasih tak terhingga kepada Wahyuni yang siap menjadi sahabat sekaligus tempat penulis mencurahkan segala keluh kesahnya.
20. Indayanti sahabat sekaligus teman kos yang selalu memberikan solusi, dorongan serta motivasi kepada penulis.

21. Penulis, Sri Andriani Putri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah melalui segala proses yang di dalamnya terdapat banyak hambatan namun memilih untuk tidak menyerah. Perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke titik ini. Setiap langkah pilihan adalah hal yang sudah dipertimbangkan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis harap agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan bagi pihak-pihak terkait di dalamnya dan terutama bagi penulis sendiri.

Palopo, 22 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Sri Andriani Putri
NIM: 1901040001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Peraturan terbaru yang menjadi pedoman resmi transliterasi huruf Arab ke huruf Latin di Indonesia adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Hingga saat ini, ini masih menjadi acuan utama yang digunakan secara luas dalam penulisan ilmiah, institusi keagamaan, dan arsip resmi. Tidak ditemukan peraturan yang lebih baru menggantikan SKB tersebut sampai tahun 2025:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

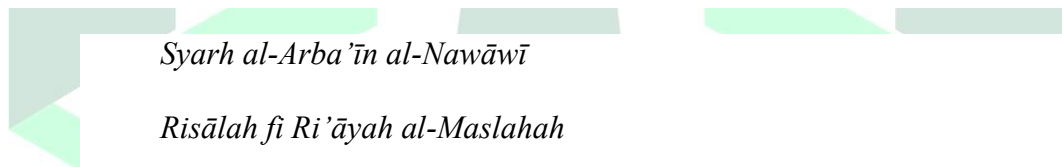
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnullāh</i>	بِاللَّهِ	<i>billāh</i>
---------------	-----------------	-----------	---------------

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riwaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Isi Penelitian	8
 BAB II KAJIAN TEORI	 10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Subjek Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data	29

E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Validasi Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu	36
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



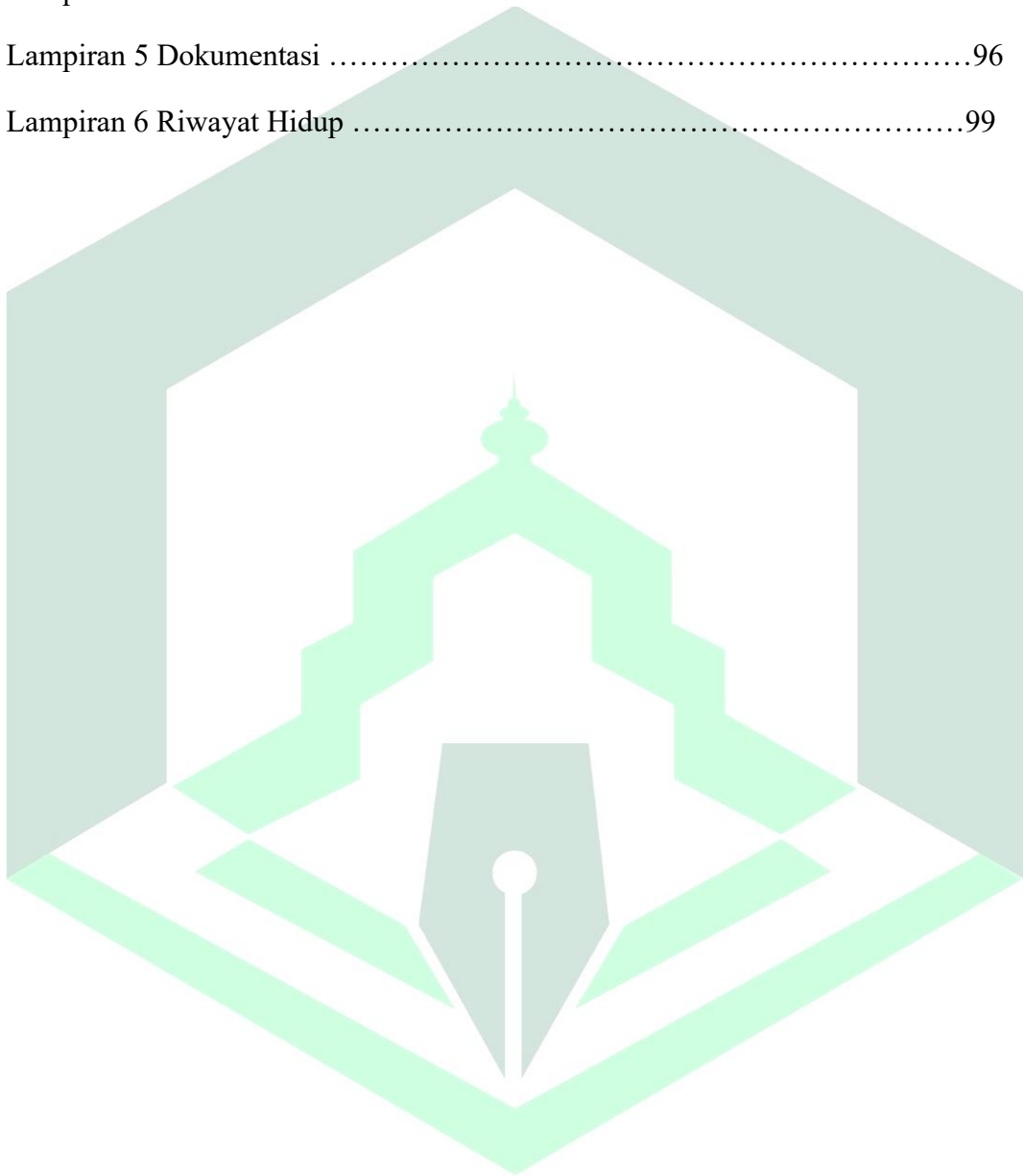
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 4 Surat Izin Meneliti	95
Lampiran 5 Dokumentasi	96
Lampiran 6 Riwayat Hidup	99



ABSTRAK

Sri Andriani Putri, 2025. “*Gatekeeping dalam Menentukan Berita Politik (Studi Kebijakan Redaksi Harian Palopo Pos).*” Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Wahyuni Husain dan Saifur Rahman.

Penelitian ini dilakukan dalam konteks pentingnya peran *gatekeeping* dalam menentukan pemberitaan politik di Harian Palopo Pos, media lokal yang berpengaruh membentuk opini publik. Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis kebijakan redaksi dalam menentukan berita politik; 2) mengidentifikasi proses *gatekeeping* di redaksi; 3) menggali peran aktor kunci dalam pengambilan keputusan editorial. Metodologi menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Narasumber penelitian terdiri dari pimpinan redaksi, wartawan, wakil ketua DPRD, serta pejabat pemerintah Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan redaksi menerapkan seleksi berita ketat berdasarkan relevansi politik dan kepentingan publik; 2) proses *gatekeeping* melibatkan tahapan diskusi redaksi, verifikasi informasi, dan pertimbangan kebijakan editorial; 3) pimpinan redaksi adalah aktor kunci dalam menentukan berita yang layak diterbitkan dengan dukungan wartawan dan sumber politik. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pengelolaan pemberitaan politik di media lokal serta pentingnya transparansi dalam proses *gatekeeping* agar pemberitaan dapat dipercaya dan akurat.

Kata Kunci: *Gatekeeping*, Berita Politik, Kebijakan Redaksi, Harian Palopo Pos, Integritas Pemberitaan

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Sri Andriani Putri, 2025. “*Gatekeeping in Determining Political News (An Editorial Policy Study of Harian Palopo Pos).*” Thesis of Islamic Communication and Broadcasting Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Wahyuni Husain and Saifur Rahman.

This research was conducted in the context of the crucial role of *gatekeeping* in determining political news coverage at *Harian Palopo Pos*, a local newspaper with significant influence in shaping public opinion. The objectives of this study are: (1) to analyze editorial policies in determining political news; (2) to identify the *gatekeeping* processes within the editorial office; and (3) to explore the role of key actors in editorial decision-making. This study employs a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of the editor-in-chief, journalists, the deputy chairperson of the Regional House of Representatives (DPRD), and government officials of the city. The findings reveal that: (1) editorial policy applies strict news selection based on political relevance and public interest; (2) the *gatekeeping* process involves stages of editorial discussion, information verification, and editorial policy considerations; (3) the editor-in-chief serves as the key actor in determining newsworthiness, supported by journalists and political sources. This study provides an in-depth understanding of the dynamics of political news management in local media and underscores the importance of transparency in the *gatekeeping* process to ensure trustworthy and accurate reporting.

Keywords: *Gatekeeping*, Political News, Editorial Policy, *Harian Palopo Pos*, News Integrity

Verified by UPB



الملخص

سري أندرياني بوتري، ٢٠٢٥. "حراسة البوابة (Gatekeeping) في تحديد الأخبار السياسية: دراسة سياسات التحرير في جريدة بالوبو بوس اليومية"، رسالة جامعية، برنامج دراسة الاتصال والإعلام الإسلامي، كلية أصول الدين والأدب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف: وحيوني حسين وسيف الرحمن.

أُجري هذا البحث في سياق أهمية دور حراسة البوابة في تحديد التغطية السياسية بجريدة بالوبو بوس اليومية، وهي وسيلة إعلام محلية مؤثرة في تشكيل الرأي العام. وتهدف الدراسة إلى: (١) تحليل سياسات التحرير في تحديد الأخبار السياسية؛ (٢) التعرف على عملية حراسة البوابة داخل هيئة التحرير؛ (٣) الكشف عن دور الفاعلين الرئيسيين في اتخاذ القرار التحريري. استخدمت الدراسة المنهج الكيفي من خلال جمع البيانات بواسطة المقابلات المتعمقة، والملاحظة، والتوثيق. وشملت مصادر البيانات رئيس التحرير، الصحفيين، نائب رئيس المجلس التشريعي المحلي ومسؤولي الحكومة في المدينة. وأظهرت نتائج البحث أن: (١) سياسة التحرير تطبق انتقاء صارماً للأخبار استناداً إلى الصلة السياسية والمصلحة العامة؛ (٢) عملية حراسة البوابة تشمل مراحل مناقشات التحرير، التحقق من المعلومات، والنظر في السياسات التحريرية؛ (٣) رئيس التحرير هو الفاعل الرئيس في تحديد الأخبار الجديدة بالنشر بدعم من الصحفيين والمصادر السياسية. وتقدم هذه الدراسة فهماً عميقاً حول ديناميات إدارة التغطية السياسية في وسائل الإعلام المحلية وأهمية الشفافية في عملية حراسة البوابة لضمان أن تكون الأخبار موثوقة ودقيقة.

الكلمات المفتاحية: حراسة البوابة، الأخبار السياسية، سياسات التحرير، جريدة بالوبو بوس اليومية، نزاهة التغطية الإعلامية

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi modern. Media tidak hanya berperan sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam mendukung demokrasi, yakni membentuk opini publik, mengawasi jalannya pemerintahan (*watchdog*), serta menyediakan ruang bagi diskusi dan edukasi publik yang memperkuat partisipasi masyarakat.¹ Dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi saat ini, masyarakat semakin bergantung pada media untuk memperoleh informasi politik yang aktual, akurat, dan relevan.² Informasi politik yang disajikan oleh media sangat memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespon isu-isu kebijakan publik, pemilihan umum, serta dinamika sosial politik yang berkembang di lingkungan mereka.

Peningkatan arus informasi di era digital telah membawa tantangan tersendiri bagi media massa. Setiap hari, redaksi media dihadapkan pada banjir informasi yang masuk dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum. Tidak semua informasi dapat

¹ Jihadul Islami and Ilham Zitri, "Pengaruh Media Massa Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Mataram," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2023): 93–109, <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.223>.

² Ariella A Yoteni, Neng Deasy Nurlatifah, and Reynaldi Pramana, "Peran Media Massa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia," *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 72–78, <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.158>.

dimuat dan di publikasikan karena keterbatasan ruang, waktu, dan sumber daya³. Proses seleksi atau penyaringan berita, yang dikenal dengan istilah *gatekeeping*, menjadi mekanisme utama untuk memastikan hanya berita yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diakses oleh publik⁴. Kriteria tersebut meliputi nilai berita, relevansi isu, kepentingan publik, serta aspek etika dan hukum jurnalistik. Peran *gatekeeper*, dalam hal ini redaktur atau editor, sangat menentukan arah, isi, dan kualitas pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat.

Pemberitaan politik menjadi salah satu isu yang paling sensitif dan strategis dalam ruang redaksi media. Setiap berita politik yang di publikasikan dapat memberikan dampak besar terhadap stabilitas sosial, dinamika politik, dan bahkan legitimasi pemerintahan. Proses seleksi berita politik tidak hanya mempertimbangkan aspek aktualitas dan signifikansi isu, tetapi juga harus memperhatikan keberimbangan, objektivitas, serta potensi dampak sosial yang mungkin timbul⁵. Tantangan semakin besar ketika media harus berhadapan dengan berbagai tekanan, baik dari internal organisasi, pemilik modal, maupun pihak-pihak eksternal seperti aktor politik dan pengiklan.⁶ Independensi dan profesionalisme redaksi diuji dalam situasi tersebut, sehingga proses *gatekeeping* menjadi semakin kompleks dan penuh pertimbangan.

³ W Husain, "Kontrol Sosial Harian Palopo Pos Dalam Mewujudkan Good Governance Di Luwu Social Control of Palopo Pos Daily Newspaper in Realizing Good ...," *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2011): 283–96, <https://core.ac.uk/download/pdf/230413033.pdf>.

⁴ Isbimayanto Celina Natalia Sitorus, Tavana Yurens, "Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Halaman Utama Di Media Cetak Harian Disway," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

⁵ Moh. Anang Ma'ruf F, "FUNGSI METAFORA POLITIK DALAM MEDIA MASSA," no. June (2022): 1–23.

⁶ Rahma Junatus Chusna, "Konstruksi Makna Pertemuan Prabowo Dan Surya Paloh Pasca Pengumuman Hasil Pilpres 2024 Dalam Framing Media Online" 13, no. 4 (2024): 1141–54, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12797>.

Media lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun demokrasi di tingkat daerah. Keberadaan media lokal seperti Harian Palopo Pos menjadi jembatan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menjadi ruang edukasi politik dan kontrol sosial di tingkat lokal⁷. Dalam konteks pemilihan umum, Harian Palopo Pos menjadi salah satu sumber utama informasi politik bagi masyarakat Palopo dan sekitarnya. Redaksi harus mampu menyaring berbagai informasi politik yang masuk, memastikan setiap berita yang dimuat telah melalui proses verifikasi, serta memenuhi standar kelayakan berita politik yang objektif dan berimbang.⁸ Proses penyaringan berita politik di media lokal sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan media nasional, seperti keterbatasan sumber daya, kedekatan dengan narasumber, serta tekanan dari aktor politik lokal yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemberitaan.⁹

Kebijakan redaksi dalam proses *gatekeeping* di Harian Palopo Pos tidak hanya didasarkan pada pertimbangan nilai berita, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bisnis, keberlanjutan media, serta tuntutan masyarakat akan informasi yang kredibel. Proses ini biasanya diawali dengan rapat redaksi, diskusi intensif mengenai isu-isu utama, serta penilaian terhadap potensi dampak sosial dari setiap berita yang akan diterbitkan. Setiap anggota redaksi dituntut untuk memiliki

⁷ Andi Sukmawati Assaad and Baso Hasyim, "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law," *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 317–34, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.

⁸ Yunita Simatupang, "Dinamika Politik Dan Pilkada Di Kota Kendari : Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Kampanye Politik Lokal" 7, no. 1 (2024): 439–47.

⁹ Sri Hadijah Arnus, Wahyuni Husain, and Dini Asriani, "Online Media Literacy among Gen Z in Kendari City in the Post Truth Era," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 1 (2023): 65–74, <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i1.7806>.

integritas, profesionalisme, dan kepekaan terhadap isu-isu politik yang berkembang di masyarakat.¹⁰ Penentuan berita politik yang layak muat juga harus memperhatikan kode etik jurnalistik, seperti prinsip keberimbangan, keakuratan, dan tidak memihak, agar media tetap dipercaya oleh masyarakat.¹¹

Penelitian mengenai kebijakan redaksi Harian Palopo Pos dalam melakukan *gatekeeping* terhadap berita politik menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana proses seleksi berita berjalan, tantangan yang dihadapi redaksi, serta strategi yang digunakan untuk menjaga kualitas dan integritas pemberitaan. Studi ini juga memberikan gambaran mengenai dinamika internal redaksi, pengaruh eksternal yang mungkin memengaruhi keputusan redaksi, serta upaya menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan politik yang layak muat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian media dan politik, serta menjadi referensi bagi media lain dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas pemberitaan politik di tingkat lokal.

Konteks lokalitas di Palopo memberikan tantangan tersendiri bagi media dalam menjalankan fungsi *gatekeeping*. Kedekatan antara jurnalis dan narasumber, keterbatasan sumber daya, serta tekanan dari berbagai pihak sering kali memengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan. Harian Palopo Pos sebagai salah satu media utama di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai sumber informasi

¹⁰ muh. Fadhli Febrian Amir, "Strategi Bisnis Media : Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos," *Universitas Hasanuddin*, 2022.

¹¹ Ria Amelinda, "Content Analysis of Religious Articles in the Opinion Column in the Palopo Pos Daily Newspaper," *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 10, no. 2 (2022): 1570–82, <https://doi.org/10.24256/ideas.v10i2.3447>.

politik yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengungkap bagaimana kebijakan redaksi Harian Palopo Pos dalam melakukan *gatekeeping* terhadap berita politik, khususnya dalam konteks pemilu 2024, serta bagaimana syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam menentukan berita politik yang layak muat.

Penelitian Marcelino Pahlevi mengkaji bagaimana redaksi Tribun Sumsel melakukan proses seleksi dan verifikasi informasi viral dari media sosial dengan menerapkan tahapan akses, pemilihan, dan publikasi secara ketat untuk menghindari penyebaran hoaks. Penelitian ini menyoroti peran gatekeeper pada media lokal daring dalam konteks konten viral, namun belum membahas khusus kebijakan redaksi media cetak lokal seperti Harian Palopo Pos dalam penyaringan berita politik pada momen strategis pemilu 2024¹². Media cetak lokal menghadapi tantangan berbeda berupa tekanan politik lokal, keterbatasan sumber daya, dan kedekatan jurnalis dengan narasumber yang berpotensi memengaruhi objektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam kebijakan redaksi dan proses seleksi berita politik di Harian Palopo Pos, guna menjaga independensi dan kredibilitas pemberitaan politik di tingkat daerah. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi akademik dan rekomendasi praktis untuk memperkuat profesionalisme media lokal serta mendukung demokrasi lokal yang sehat dan transparan.

¹² “Analisis Gatekeeper Dalam Pemilihan Informasi Viral Media Sosial Di Tribun Sumsel” 02, no. 02 (2024): 308–19, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep gatekeeping dalam konteks media nasional, media daring, maupun media sosial, yang mayoritas berfokus pada dimensi teoritis atau praktik di kota besar dan media arus utama. Di sisi lain, kajian yang khusus menelaah kebijakan redaksi media lokal, terutama media cetak seperti Harian Palopo Pos, dalam proses penyaringan dan penentuan berita politik pada masa-masa kritis seperti pemilu 2024 masih sangat terbatas. Padahal, media lokal menghadapi tantangan khas yang berbeda, seperti kedekatan personal dengan narasumber, keterbatasan sumber daya, serta tekanan yang datang dari aktor politik daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting sebagai upaya mengisi kekosongan literatur dengan memaparkan secara komprehensif mekanisme gatekeeping yang diterapkan oleh redaksi Harian Palopo Pos dalam memilih berita politik yang layak disajikan, sekaligus bagaimana mereka mengambil keputusan editorial di tengah tekanan politik selama periode November 2023 hingga Februari 2024 menjelang pemilu.

Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja redaksi dalam menyaring berita politik, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan redaksi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga independensi dan profesionalisme media lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pengelola media, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi media, serta mendorong terciptanya ekosistem media yang sehat, profesional, dan berintegritas di tingkat lokal.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus, maka batasan masalah dalam studi ini adalah:

1. Penelitian ini hanya membahas proses *gatekeeping* dalam pemberitaan politik yang dimuat oleh redaksi Harian Palopo Pos selama periode 1 November 2023 hingga 15 Februari 2024, menjelang hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.
2. Fokus pembahasan terbatas pada kebijakan redaksi dalam memilih, menyunting, dan menerbitkan berita-berita politik, termasuk bagaimana redaksi menyikapi tekanan politik, kepentingan pemilik modal, dan dinamika lokal di Kota Palopo.
3. Penelitian tidak akan membahas konten berita non-politik, berita opini, atau artikel advertorial politik secara mendalam, kecuali jika dianggap bagian dari proses *gatekeeping* politik.
4. Penelitian juga tidak mengevaluasi efektivitas pemberitaan atau dampaknya terhadap pemilih, melainkan terbatas pada mekanisme internal redaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyaringan berita politik oleh Tim Redaksi Harian Palopo Pos pada pemilu 2024 yang disajikan kepada publik?
2. Bagaimana kebijakan redaksi Harian Palopo Pos yang ditetapkan dalam *gatekeeping* untuk menentukan berita politik?

3. Apa saja faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keputusan dari redaksi harian Palopo pos dalam menentukan berita politik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses penyaringan berita politik oleh Tim Redaksi Harian Palopo Pos pada pemilu 2024.
2. Untuk menganalisis kebijakan Haria Palopo Pos yang ditetapkan dalam *gatekeeping* untuk menentukan berita politik
3. Untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keputusan dari redaksi harian Palopo Pos dalam menentukan berita politik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian media, jurnalisme, dan politik. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan refleksi bagi akademisi, peneliti, serta mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang proses *gatekeeping*, kebijakan redaksi, serta dinamika penyaringan berita politik di media lokal. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang praktik jurnalistik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung bagi peneliti dalam memahami proses kerja redaksi, tantangan, serta strategi yang diterapkan dalam menyaring dan menerbitkan berita politik. Peneliti juga memperoleh wawasan baru mengenai penerapan kode etik jurnalistik dan kebijakan redaksi dalam menentukan berita politik yang layak muat di media lokal.

b. Manfaat bagi Media dan Praktisi Jurnalistik

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi redaksi Harian Palopo Pos maupun media lokal lainnya dalam meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan integritas dalam proses *gatekeeping* berita politik. Media dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai acuan untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan redaksi, khususnya dalam menghadapi tantangan dan tekanan eksternal saat pemilu.

c. Manfaat bagi Pembaca dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi media masyarakat, sehingga pembaca lebih memahami bagaimana proses seleksi dan penyajian berita politik berlangsung di media lokal. Masyarakat juga dapat lebih kritis dalam menerima dan menanggapi berita politik, serta memahami pentingnya peran media dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

G. Kerangka Isi Penelitian

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi, struktur dokumen akan dibagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi. Di dalam bab ini, penulis akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Sub-bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teori dan informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian yang diterapkan, sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan temuan yang diperoleh dari pengumpulan data dan menganalisisnya sesuai dengan kerangka teori dan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya.

5. Bab V: Penutup

Pada bab ini membahas kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Terdiri dari pengenalan, ringkasan temuan, diskusi, rekomendasi penelitian, dan penutup. Diskusi menjelaskan makna temuan dan hubungannya dengan teori. Rekomendasi penelitian lanjutan dan untuk pihak tertentu juga diberikan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sugeng Rabiul Darza dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hierarki Pengaruh *Gatekeeper* Dalam Produksi Berita Politik Media RadarBogor.id” bertujuan menjelaskan bagaimana proses *gatekeeping* berlangsung dalam produksi berita politik di RadarBogor.id. Penelitian ini menggunakan teori Hierarki Pengaruh dari Shoemaker dan Reese, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap redaksi RadarBogor.id. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses produksi berita politik di RadarBogor.id mengikuti tahapan *gatekeeping* yang khas, dipengaruhi oleh lima level hierarki: individu, kerutinan media, organisasi, ekstramedia, dan sistem sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada media online RadarBogor.id dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Keterbatasan utama terletak pada konteks geografis dan media yang diteliti, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika *gatekeeping* di media cetak seperti Harian Palopo Pos. Selain itu, fokus pada berita politik dapat menyisakan aspek lain dari proses *gatekeeping* yang tidak terungkap. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan organisasi dan kepentingan ideologis turut memengaruhi isi pemberitaan politik.¹³ Adapun persamaan

¹³ Sugeng Rabiul Darza, “Gatekeeper Dalam Produksi Berita Politik Media Radarbogor . Id,” 2024.

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada fokus pembahasan proses *gatekeeping* dan penggunaan teori Hierarki Pengaruh, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara. Perbedaannya adalah Penelitian Terdahulu meneliti media online RadarBogor.id di Kota Bogor, sedangkan penelitian saya akan dilakukan pada media cetak Harian Palopo Pos dengan fokus pada kebijakan redaksi dalam menentukan berita politik layak muat.

2. Celina Natalia Sitorus, Tavana Yurens, dan Isbimayanto meneliti “*Gatekeeping* dalam Produksi Berita pada Halaman Utama di Media Cetak Harian Disway”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *gatekeeping* dilakukan oleh tim redaksi Harian Disway dalam menentukan berita yang layak tayang di halaman utama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam kepada dua *key informan*, yaitu pemimpin redaksi dan reporter. Keterbatasan pada penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin redaksi dan reporter di Harian Disway, yang mungkin tidak mewakili keseluruhan perspektif tim redaksi. Keterbatasan lainnya adalah fokus pada halaman utama, yang bisa mengabaikan proses *gatekeeping* dalam rubrik atau bagian lain dari media. Dampak dari keputusan editorial terhadap audiens juga tidak dieksplorasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gatekeeping* dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan liputan, pemilihan berita oleh redaktur, penyuntingan sesuai kaidah jurnalistik, hingga validasi akhir oleh pemimpin redaksi. Faktor

utama yang memengaruhi seleksi berita adalah kesesuaian dengan visi misi media, nilai berita, serta kedekatan emosional dengan audiens.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis proses gatekeeping di media cetak. Penelitian ini juga relevan dengan empat konsep utama Lewin *channel*, *section*, *force*, dan *gate* karena sama-sama menelusuri alur seleksi berita, tahapan redaksional, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan, serta peran akhir *gatekeeper* dalam menentukan kelayakan berita untuk di publikasikan perbedaannya terletak pada fokus media: Sitorus et al. meneliti Harian Disway secara umum, sementara penelitian ini secara spesifik meneliti kebijakan redaksi pada rubrik politik Harian Palopo Pos.

3. Rudi Gusti Prayoga meneliti “Analisa *Gatekeeping* dalam Memberikan Informasi dan Partisipasi Publik pada Media Sosial Instagram @beritamagetan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses *gatekeeping* dilakukan oleh pengelola akun Instagram @beritamagetan dalam memilih dan memodifikasi informasi sebelum disebarkan ke publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Keterbatasan Penelitian ini mengkaji gatekeeping di media sosial Instagram @beritamagetan, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan media cetak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah

¹⁴ Isbimayanto Celina Natalia Sitorus, Tavana Yurens, “Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Halaman Utama Di Media Cetak Harian Disway,” *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.

penggunaan metode pengumpulan data yang mungkin tidak mencakup seluruh konteks berita, terutama dalam hal informasi yang disebarkan sebelum di publikasikan. Juga, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk media cetak yang memiliki proses editorial yang lebih terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *gatekeeping* dilakukan melalui tahapan pemilihan berita dari sumber terpercaya, modifikasi konten agar sesuai dengan pedoman komunitas media sosial, dan penyaringan terhadap isu yang berpotensi menimbulkan konflik atau kontroversi.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji proses *gatekeeping* dalam penyampaian informasi kepada publik, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada media yang dikaji, di mana Rudi Gusti meneliti media sosial berbasis digital (*Instagram*), sedangkan penelitian saya fokus pada media cetak Harian Palopo Pos serta secara khusus menyoroti kebijakan redaksi dalam pemuatan berita politik.

4. Natalia Aruguete, Ernesto Calvo, dan Tiago Ventura dalam artikelnya yang berjudul “*News Sharing, Gatekeeping, and Polarization: A Study of the #Bolsonaro Election*” meneliti bagaimana proses *gatekeeping* bertransformasi di tengah meningkatnya pembagian berita oleh audiens dalam media sosial selama pemilu di Brasil. Penelitian ini menggabungkan teori *gatekeeping* dengan model preferensi audiens, dan menyimpulkan bahwa perilaku berbagi berita yang terpolarisasi menyebabkan organisasi

¹⁵ Rudi Gusti Prayoga, “Analisa Gatekeeping Dalam Memberikan Informasi Danpartisipasi Publik Pada Media Sosial Instagram @beritamagetan,” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

media – terutama yang bereputasi rendah – cenderung memproduksi konten yang lebih ekstrem secara ideologis demi meraih keterlibatan audiens. Keterbatasan Penelitian ini berfokus pada media daring selama pemilu di Brasil, yang berbeda konteks dengan penelitian di media cetak lokal. Keterbatasan utama adalah penggunaan pendekatan kuantitatif yang berbasis analisis data media sosial, yang kurang mampu menangkap nuansa proses *gatekeeping* yang terjadi di media cetak. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada perilaku audiens, yang mungkin tidak relevan untuk memahami kebijakan editorial di Harian Palopo Pos. Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis data media sosial (*Twitter*) dalam skala besar¹⁶. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus pembahasan tentang mekanisme *gatekeeping* serta pengaruh faktor eksternal terhadap proses seleksi berita, khususnya dalam konteks politik. Keduanya juga sama-sama mengkaji dinamika antara media, kebijakan editorial, dan tekanan lingkungan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada media daring dan perilaku *audiens* di media sosial selama pemilu Brasil, sedangkan penelitian saya berfokus pada media cetak lokal Harian Palopo Pos dan proses internal redaksi dalam menentukan berita politik layak muat menjelang pemilu 2024.

5. Margareta Salonen, Veera Ehrlén, Minna Koivula, dan Karoliina Talvitie-Lamberg dalam artikelnya yang berjudul "*Post-Publication Gatekeeping Factors and Practices: Data, Platforms, and Regulations in News Work*"

¹⁶ Natalia Aruguete, Ernesto Calvo, and Tiago Ventura, "News Sharing, Gatekeeping, and Polarization: A Study of the #Bolsonaro Election," *Digital Journalism* 9, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1852094>.

membahas bagaimana proses *gatekeeping* tidak hanya terjadi sebelum publikasi berita, tetapi juga setelah berita di publikasikan atau dikenal sebagai *post-publication gatekeeping*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap sembilan pekerja media dari tiga organisasi berita di Finlandia. Temuan mereka menunjukkan bahwa data audiens, algoritma platform, serta regulasi (termasuk GDPR) turut memengaruhi keputusan editorial, bahkan setelah berita diterbitkan. Keterbatasan Penelitian ini membahas aspek *post-publication gatekeeping* dalam konteks media digital di Finlandia, yang tidak dapat diterapkan langsung pada media cetak seperti Harian Palopo Pos. Keterbatasan lainnya adalah fokus pada regulasi dan algoritma platform yang mungkin tidak relevan dalam konteks media cetak yang memiliki kebijakan editorial yang berbeda. Penelitian ini juga tidak menyentuh pada aspek kebijakan redaksi dalam pemuatan berita politik secara spesifik. Studi ini mengembangkan kerangka baru dengan menambahkan elemen regulasi ke dalam model *4P* Hermida (*publics, platforms, paraphernalia, practices*), yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi arus informasi *pasca-publikasi*.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada pembahasan mengenai proses *gatekeeping* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal redaksi maupun eksternal seperti tekanan regulasi dan platform distribusi. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

¹⁷ Margareta Salonen et al., "Post-Publication Gatekeeping Factors and Practices: Data, Platforms, and Regulations in News Work," *Media and Communication* 11, no. 2 (2023): 367–78, <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6486>.

Perbedaannya, penelitian terdahulu. berfokus pada media di Finlandia dalam konteks digital dan datafikasi, sedangkan penelitian saya difokuskan pada media cetak lokal Harian Palopo Pos, dengan penekanan pada proses seleksi dan kebijakan redaksi dalam memuat berita politik selama masa pemilu 2024.

B. Landasan Teori

1. *Gatekeeping*

Gatekeeping merupakan konsep penting dalam studi komunikasi massa, khususnya dalam dunia jurnalistik dan media. Dalam konteks media, *gatekeeping* diartikan sebagai proses seleksi, penyaringan, dan pengendalian informasi yang akan disampaikan kepada publik melalui media massa.¹⁸ Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1947 dalam konteks psikologi sosial, yang kemudian dikembangkan dan diadaptasi ke dalam studi komunikasi oleh David Manning White pada tahun 1950.

Menurut Pamela Shoemaker, *gatekeeping* adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok (seperti redaktur, editor, atau wartawan) untuk memutuskan informasi mana yang layak di publikasikan dan mana yang tidak. Setiap tahapan seleksi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti nilai berita, kepentingan publik, kebijakan

¹⁸ Shania Shaufa, "Gatekeeping Inews.Id Dalam Pemberitaan Tentang Pembatasan Ibadah Di Masjid" 2, no. 2 (2023): 401–4, https://doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3_46.

redaksi, serta norma dan etika jurnalistik¹⁹. Proses ini meliputi pengumpulan, pemilihan, penyuntingan, hingga penyajian berita kepada khalayak.

Gatekeeping tidak hanya berfungsi sebagai filter informasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang menentukan arah dan isi pemberitaan. Melalui proses ini, media berperan aktif dalam membentuk opini publik, menetapkan agenda, serta menjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang beredar di masyarakat.

Shoemaker dan Reese mengidentifikasi lima level yang memengaruhi proses *gatekeeping*, yaitu:²⁰

1. Individu: Nilai, pengalaman, dan preferensi pribadi wartawan atau editor.
2. Rutin Media: Prosedur kerja, kebiasaan, dan standar operasional di ruang redaksi.
3. Organisasi Media: Kebijakan, visi-misi, dan kepentingan bisnis perusahaan media.
4. Ekstramedia: Tekanan dari pihak luar seperti pemilik modal, pemerintah, atau pengiklan.

¹⁹ Malin Fecke et al., "The Ethics of Gatekeeping: How Guarding Access Influences Digital Child and Youth Research," *Media and Communication* 10, no. 1 (2022): 361–70, <https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4756>.

²⁰ Dinda Annaf Salsabila, "Menguasai Narasi Melalui Proses Kreatif Di Ruang Redaksi," 2024.

5. Sistem Sosial: Norma, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Setiap faktor tersebut dapat memengaruhi keputusan akhir tentang berita mana yang layak dimuat dan bagaimana berita tersebut disajikan kepada publik.

Gatekeeping dalam pemberitaan politik menjadi sangat penting karena berita politik memiliki sensitivitas tinggi dan dapat berdampak langsung pada opini publik, stabilitas sosial, serta legitimasi pemerintahan. Proses seleksi berita politik tidak hanya mempertimbangkan aspek aktualitas dan signifikansi, tetapi juga harus memperhatikan keberimbangan, objektivitas, serta potensi dampak sosial yang mungkin timbul.

Teori Kurt Lewin dapat digunakan untuk menganalisis berbagai "pintu gerbang" (*gate*) yang dilalui informasi dalam proses *gatekeeping*. Misalnya, pada tahap *channel*, kita dapat mengeksplorasi bagaimana berita politik disaring melalui prosedur redaksional yang ada. Sementara itu, teori Shoemaker dan Reese dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal, seperti nilai berita, kepentingan publik, dan tekanan dari aktor politik, memengaruhi keputusan redaksi dalam memilih berita.

Redaksi media sebagai *gatekeeper* utama harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan publik, kode etik jurnalistik, dan

tekanan eksternal yang mungkin datang dari aktor politik, pemilik media, atau kelompok kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini, setiap fokus akan dikaitkan dengan teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses *gatekeeping* yang terjadi di Harian Palopo Pos.

2. Teori *Gatekeeping* Kurt Lewin

Teori *gatekeeping* yang dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1947 merupakan fondasi awal dalam memahami proses seleksi dan penyaringan informasi sebelum sampai ke publik. Lewin memperkenalkan konsep ini pertama kali dalam konteks psikologi sosial, khususnya pada aliran makanan dalam keluarga, namun kemudian diaplikasikan secara luas dalam dunia komunikasi dan media massa. Dalam teori ini, Lewin menjelaskan bahwa informasi yang mengalir dari satu titik ke titik lain akan melewati beberapa “pintu gerbang” (*gate*) yang dijaga oleh “penjaga gerbang” (*gatekeeper*).²¹ Setiap pintu gerbang ini berfungsi untuk menyaring, menahan, atau membiarkan informasi melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya. Proses ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu *channel*, *section*, *force*, dan *gate*.

²¹ Beno, Silen, and Yanti, “Analisis Proses Gatekeeping Pada Pemberitaan Akun Media Sosial,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

a. *Channel*

Channel dalam teori *gatekeeping* Kurt Lewin adalah jalur atau saluran yang dilalui oleh informasi dari sumber hingga ke penerima akhir. *Channel* dapat diibaratkan sebagai aliran utama yang membawa informasi melewati berbagai tahapan dalam proses komunikasi. Dalam konteks media massa, *channel* bisa berarti rangkaian proses redaksional yang dimulai dari pengumpulan berita, penulisan, penyuntingan, hingga akhirnya berita di publikasikan kepada masyarakat. Setiap *channel* memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, tergantung pada struktur organisasi media, sistem kerja redaksi, serta teknologi yang digunakan.

Channel ini sangat penting karena menentukan seberapa banyak dan seberapa cepat informasi dapat diproses dan disampaikan kepada publik. Di dalam setiap *channel*, terdapat sejumlah titik kontrol yang memungkinkan adanya penyaringan dan seleksi informasi. Dengan demikian, *channel* berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan berbagai tahapan dalam proses produksi berita.

Kaitannya dengan penelitian saya *channel* dapat diidentifikasi sebagai rangkaian proses redaksional yang dilalui berita politik di Harian Palopo Pos.²² Setiap berita politik yang masuk akan melewati berbagai channel, mulai dari reporter, redaktur, hingga pemimpin redaksi, sebelum akhirnya diputuskan layak atau tidak untuk di publikasikan.

²² Celina Natalia Sitorus, Tavana Yurens, "Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Halaman Utama Di Media Cetak Harian Disway."

b. Section

Section adalah bagian-bagian atau segmen yang terdapat di dalam setiap *channel*. Setiap *channel* terdiri dari beberapa *section* yang berfungsi sebagai titik-titik penyaringan informasi. *Section* dapat berupa tahapan-tahapan spesifik dalam proses produksi berita, seperti tahap pengumpulan data, penulisan naskah, penyuntingan, hingga tahap verifikasi akhir. Pada setiap *section*, informasi yang masuk akan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, misalnya nilai berita, relevansi, kelengkapan data, dan potensi dampak sosial.

Keberadaan *section* memungkinkan proses seleksi berjalan secara bertahap dan sistematis. Setiap *section* memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan redaksi. Misalnya, pada *section* pengumpulan berita, reporter bertugas mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Pada *section* penyuntingan, redaktur akan menilai kelayakan berita berdasarkan kaidah jurnalistik dan kebijakan media. Dengan adanya *section*, proses *gatekeeping* menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penelitian ini, *section* merepresentasikan tahapan-tahapan yang harus dilalui berita politik di Harian Palopo Pos sebelum dinyatakan layak muat. Setiap *section* menjadi ruang bagi redaksi untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan penilaian terhadap berita politik,

sehingga hanya berita yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat lolos ke tahap berikutnya.

c. Force

Force atau kekuatan adalah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan di setiap *section* atau *gate*. *Force* dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi media. Faktor internal meliputi kebijakan redaksi, nilai-nilai jurnalistik, pengalaman dan integritas wartawan, serta visi-misi perusahaan media. Sementara faktor eksternal bisa berupa tekanan dari pemilik media, pengiklan, pemerintah, aktor politik, atau bahkan tuntutan masyarakat. *Force* inilah yang menentukan apakah suatu informasi akan lolos atau tertahan di salah satu *section* dalam *channel*.

Force sangat menentukan arah dan isi pemberitaan, karena setiap keputusan yang diambil oleh *gatekeeper* selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Misalnya, tekanan untuk menjaga independensi media di tengah kepentingan politik atau bisnis dapat menjadi *force* yang sangat kuat dalam proses seleksi berita. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan preferensi *audiens* juga dapat menjadi *force* yang memengaruhi proses *gatekeeping*.

Dalam penelitian saya *force* menjadi sangat relevan karena proses seleksi berita politik di Harian Palopo Pos tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik internal maupun eksternal. Penelitian ini akan mengkaji

bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut memengaruhi keputusan redaksi dalam menentukan berita politik yang layak muat.

d. Gate

Gate adalah titik atau pintu gerbang utama di setiap *section* yang menjadi tempat pengambilan keputusan akhir. *Gatekeeper*, dalam hal ini redaktur atau editor, bertugas sebagai penjaga gerbang yang memutuskan apakah informasi dapat melewati *gate* tersebut dan melanjutkan ke tahap berikutnya, atau justru dihentikan. Setiap *gate* memiliki kriteria dan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh informasi yang masuk, sehingga tidak semua informasi dapat lolos ke tahap berikutnya.

Keberadaan *gate* sangat penting dalam menjaga kualitas, objektivitas, dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. *Gatekeeper* harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan publik, kode etik jurnalistik, serta tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan.²³ Proses pengambilan keputusan di *gate* sering kali melibatkan diskusi dan pertimbangan yang matang, terutama dalam pemberitaan politik yang sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi.

Gatekeeping dalam media massa merupakan proses inti yang menentukan informasi apa saja yang dapat diakses oleh publik melalui media. Dalam dunia jurnalistik, istilah *gatekeeping* merujuk pada serangkaian mekanisme seleksi, penyaringan, dan pengendalian arus berita

²³ Celina Natalia Sitorus, Tavana Yurens, "Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Halaman Utama Di Media Cetak Harian Disway."

yang dilakukan oleh para redaktur, editor, atau pihak-pihak lain yang berwenang di ruang redaksi. Proses ini sangat penting karena setiap hari media menerima banjir informasi dari berbagai sumber, sementara ruang dan waktu untuk publikasi sangat terbatas.²⁴ Oleh sebab itu, hanya berita yang memenuhi kriteria tertentu yang akhirnya dipilih untuk di publikasikan.²⁵ Hal ini berarti, berita yang sudah dievaluasi oleh Tim Redaksi yang bisa dipublikasi.

Gatekeeping tidak hanya berfungsi sebagai filter, tetapi juga sebagai penentu arah dan isi pemberitaan. Setiap media massa memiliki kebijakan, nilai, dan standar tersendiri dalam menentukan berita yang layak muat. Kriteria utama yang biasanya digunakan meliputi nilai berita (*news value*), relevansi isu, kepentingan publik, aktualitas, serta pertimbangan etika dan hukum jurnalistik.²⁶ Selain itu, proses *gatekeeping* juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti visi-misi media, kebijakan redaksi, dan rutinitas kerja, maupun faktor eksternal seperti tekanan dari pemilik media, pengiklan, pemerintah, atau kelompok kepentingan tertentu.

Peran *gatekeeper* sangat strategis karena mereka memiliki otoritas untuk memilih, menyunting, bahkan mengubah sudut pandang sebuah

²⁴ Arnita Ismawati et al., "Gatekeeping Perspektif Bruce Westle and Malcolm Mclean Dalam Produksi Berita Online Wwww.Wonogirikab.Go.Id" 7, no. 2 (2024): 388–99.

²⁵ Wahyuni Husain et al., "Pemberdayaan Literasi Media Bagi Pemuda Di Kelurahan Purangi Kota Palopo," *Islamic Management and Empowerment Journal* 5, no. 2 (2023): 119–34, <https://doi.org/10.18326/imej.v5i2.119-134>.

²⁶ Firman Anggara Krisnawan and Faris Budiman annas, "Analisis Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Media the Iconomics," *Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2024): 74–89, <https://doi.org/10.51353/kvg.v5i1.963>.

berita sebelum di publikasikan. Dengan demikian, media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik, menetapkan agenda, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Proses *gatekeeping* yang dilakukan secara profesional dan berintegritas akan menghasilkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan kredibel.²⁷ Sebaliknya, jika proses ini dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka media dapat menjadi alat propaganda atau bahkan menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Gatekeeping dalam pemberitaan politik memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan pemberitaan isu-isu lain. Berita politik cenderung sensitif, penuh dinamika, dan sangat berpotensi memengaruhi opini publik, stabilitas sosial, serta legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, proses seleksi dan penyaringan berita politik membutuhkan kehati-hatian ekstra, pertimbangan yang matang, dan integritas tinggi dari para *gatekeeper* di ruang redaksi.

Dalam pemberitaan politik, *gatekeeper* tidak hanya mempertimbangkan nilai berita dan aktualitas, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keberimbangan (*balance*), objektivitas, serta potensi dampak sosial yang mungkin timbul. Setiap berita politik yang dipilih untuk di publikasikan harus melalui proses verifikasi yang ketat, analisis mendalam terhadap sumber informasi, serta penilaian terhadap kemungkinan munculnya konflik kepentingan. Selain itu, redaksi juga

²⁷ “Analisis Gatekeeper Dalam Pemilihan Informasi Viral Media Sosial Di Tribun Sumsel.”

harus mampu menahan tekanan dari berbagai pihak, baik internal seperti pemilik media dan kepentingan bisnis, maupun eksternal seperti aktor politik, pemerintah, dan kelompok kepentingan.²⁸ Peran Tim Redaksi menjadi pengaruh dalam menyelesaikan tugas dalam proses penerbitan berita politik layak muat, sehingga harus mampu memposisikan diri sebagai Tim Redaksi.

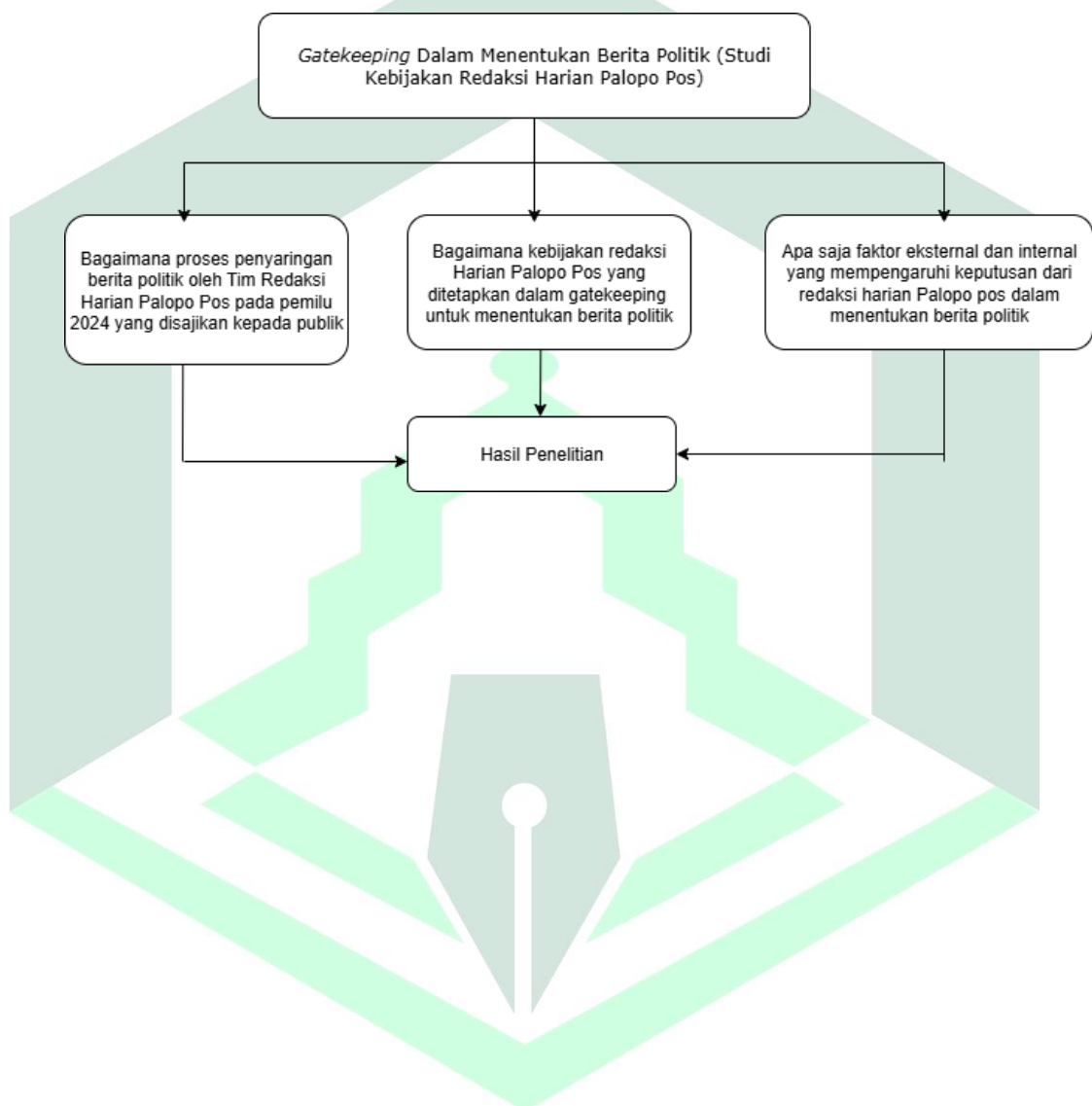
Proses *gatekeeping* dalam pemberitaan politik sangat menentukan kualitas demokrasi di suatu negara atau daerah. Media yang mampu menjalankan fungsi *gatekeeping* secara independen dan profesional akan menjadi pilar penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, jika proses ini dikompromikan oleh kepentingan tertentu, maka media dapat kehilangan kepercayaan publik dan justru memperburuk polarisasi politik di Masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Dalam era informasi yang semakin kompleks, proses *gatekeeping* di media massa, khususnya dalam pemberitaan politik, menjadi sangat penting untuk dipahami. *Gatekeeping* berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang menentukan berita mana yang layak disajikan kepada publik, dan dampaknya sangat besar terhadap opini masyarakat serta stabilitas sosial. Penelitian ini akan menggali bagaimana redaksi Harian Palopo Pos menjalankan fungsi *gatekeeping* dalam konteks pemilu 2024, dengan memerhatikan berbagai

²⁸ Isti Purwi Tyas Utami and Syaharani Putri, "Gatekeeping Pemberitaan Pembunuhan Pada Harian Poskota.Co.Id," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.36914/jikb.v9i1.998>.

faktor yang memengaruhi keputusan editorial. Penting memahami kerangka pikir yang mendasari proses ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan dinamika yang dihadapi media lokal dalam menjaga integritas dan objektivitas pemberitaan politik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses *gatekeeping* yang dilakukan oleh redaksi Harian Palopo Pos dalam menentukan berita politik yang layak muat, khususnya pada masa pemilu 2024. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji kebijakan redaksi secara komprehensif dengan fokus pada praktik penyaringan berita politik di media lokal tersebut.²⁹ Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota redaksi, observasi, serta dokumentasi proses seleksi dan penerbitan berita politik, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat naratif, kontekstual, dan mendalam. Metode ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika internal redaksi, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan editorial, serta tantangan dalam menjaga objektivitas dan profesionalisme media lokal di tengah tekanan politik dan ekonomi pada masa pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya kajian media, jurnalisme, dan politik.

²⁹ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor redaksi Harian Palopo Pos, yang beralamat di Jl. Andi Djemma No. 87, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kode pos 91921. Harian Palopo Pos dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu media cetak lokal yang memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi politik di wilayah Palopo dan sekitarnya. Selain itu, Harian Palopo Pos menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat setempat, khususnya pada masa pemilihan umum. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data, melakukan observasi, serta wawancara langsung dengan pihak redaksi terkait proses *gatekeeping* dalam menentukan berita politik yang layak muat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah peneliti menyelesaikan seminar proposal, memperoleh persetujuan dari tim pembimbing, serta mendapatkan surat izin penelitian dari kampus dan pihak terkait, yaitu manajemen Harian Palopo Pos. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan, dimulai pada bulan Juni 2025 hingga Juli 2025, atau menyesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan penelitian di lapangan. Penelitian akan segera dilaksanakan setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, agar proses pengumpulan data dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penyaringan dan penentuan berita politik di Harian Palopo Pos. Para subjek penelitian dipilih secara purposive karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan akurat terkait dengan kebijakan redaksi serta proses *gatekeeping* dalam menentukan berita politik layak muat. Melalui keterlibatan para subjek ini, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan secara komprehensif dinamika internal redaksi Harian Palopo Pos dalam melakukan seleksi berita politik.

1. Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos

Pimpinan redaksi merupakan subjek utama dalam penelitian ini karena memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan redaksi, termasuk dalam proses seleksi dan penentuan berita politik yang layak muat. Pimpinan redaksi diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai standar, pedoman, dan pertimbangan yang digunakan dalam proses *gatekeeping*, serta menjelaskan tantangan dan tekanan yang dihadapi dalam menjaga objektivitas dan integritas pemberitaan politik di media lokal.

2. Redaktur dan Editor Harian Palopo Pos

Redaktur dan editor adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penyaringan, penyuntingan, dan penentuan berita yang akan di publikasikan. Mereka berperan sebagai *gatekeeper* utama yang

menyeleksi berita politik berdasarkan nilai berita, relevansi isu, serta kode etik jurnalistik. Melalui wawancara dan diskusi dengan redaktur dan editor, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang mekanisme kerja redaksi, pertimbangan dalam memilih berita, serta dinamika internal yang memengaruhi keputusan akhir terkait berita politik.

3. Wartawan Politik Harian Palopo Pos

Wartawan atau reporter yang bertugas meliput isu-isu politik juga menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Mereka merupakan pihak pertama yang mengumpulkan data dan informasi politik dari lapangan, serta menyusun naskah berita untuk diajukan ke redaksi. Pengalaman dan pandangan wartawan sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana proses seleksi berita berlangsung dari tahap awal, serta kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan dan menyajikan berita politik yang layak muat.

4. Narasumber Eksternal (Tokoh Politik dan Pemerintah)

Selain pihak internal redaksi, penelitian ini juga melibatkan narasumber eksternal seperti tokoh politik dan Pemerintah Kota yang sering menjadi sumber informasi dalam pemberitaan politik Harian Palopo Pos. Narasumber eksternal ini dapat memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana proses *gatekeeping* di media lokal berlangsung, serta menilai sejauh mana kebijakan redaksi mampu menjaga keberimbangan dan objektivitas dalam pemberitaan politik.

D. Definisi Istilah

1. Berita Politik

Berita adalah laporan mengenai peristiwa aktual yang disampaikan kepada publik melalui media massa. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan pemerintahan. Dengan demikian, berita politik adalah informasi yang memuat peristiwa, kebijakan, atau dinamika politik yang penting untuk diketahui masyarakat.

2. Tim Redaksi

Tim redaksi adalah kelompok kerja di media massa yang bertugas mengelola proses pemberitaan mulai dari seleksi, penyuntingan, hingga penerbitan. Tim ini berperan sebagai *gatekeeper* dalam menentukan kelayakan sebuah berita, termasuk berita politik.

3. Media Harian Palopo Pos

Harian *Palopo Pos* adalah media cetak lokal di Kota Palopo yang berdiri sejak tahun 2000. Media ini berperan penting dalam menyajikan informasi, terutama terkait isu sosial dan politik, serta menjadi salah satu sumber utama berita bagi masyarakat Palopo dan sekitarnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan relevan terkait proses *gatekeeping* dalam pembentukan berita politik layak muat di Harian Palopo Pos. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik dipilih

untuk saling melengkapi dan memperkuat validitas data yang diperoleh.

4. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan kerja redaksi Harian Palopo Pos. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas, interaksi, dan dinamika yang terjadi di ruang redaksi, khususnya dalam proses rapat redaksi, diskusi penentuan berita, serta alur kerja penyaringan berita politik. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses *gatekeeping*, pola komunikasi antar anggota redaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemuatan berita politik.

Melalui observasi, peneliti dapat mencatat situasi, perilaku, dan proses kerja secara objektif, sehingga dapat memperkuat data hasil wawancara dan memberikan konteks yang lebih jelas terhadap temuan penelitian.

5. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara langsung kepada informan kunci, yaitu pimpinan redaksi, redaktur, editor, serta wartawan Harian Palopo Pos yang terlibat dalam proses seleksi dan penentuan berita politik. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi mengenai kebijakan redaksi, pertimbangan dalam memilih berita

politik, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses *gatekeeping* di ruang redaksi.

Teknik wawancara ini sangat penting untuk mendapatkan data primer yang bersifat subjektif dan mendalam, sehingga peneliti dapat memahami secara langsung pengalaman, pandangan, serta strategi yang diterapkan oleh pihak redaksi Harian Palopo Pos dalam menentukan berita politik layak muat.

6. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti arsip berita politik yang telah dimuat, notulen rapat redaksi, pedoman atau kebijakan redaksi, serta dokumen lain yang relevan dengan proses seleksi berita politik di Harian Palopo Pos. Dokumentasi ini penting untuk menelusuri jejak seleksi berita, menilai konsistensi kebijakan redaksi, serta membandingkan antara praktik di lapangan dengan dokumen resmi yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan ini dilakukan secara bersamaan dan berulang selama proses penelitian untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan masing-masing

tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, di mana peneliti melakukan seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan tema atau variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu proses *gatekeeping* dalam pembentukan berita politik layak muat di Harian Palopo Pos, serta mengabaikan data yang tidak relevan. Reduksi data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut dan menjaga agar data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah dipilih dan dirangkum disusun dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau diagram sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam uraian teks naratif yang menggambarkan secara jelas proses *gatekeeping*, kebijakan redaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan berita politik di Harian Palopo Pos. Penyajian

data yang baik akan membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan di lapangan, kemudian melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil analisis. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta melakukan triangulasi data. Kesimpulan akhir yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan proses *gatekeeping* dan mengidentifikasi syarat serta ketentuan yang diterapkan oleh redaksi Harian Palopo Pos dalam menentukan berita politik layak muat.

G. Validasi Data (*Data Validation*)

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan keakuratan, kredibilitas, dan relevansi informasi yang diperoleh, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Validasi tidak hanya dilakukan melalui teknik lapangan seperti triangulasi, tetapi juga melalui validasi literatur dan kontekstual, yaitu:

a. Validasi Literatur

Peneliti mengkaji dan membandingkan data temuan lapangan dengan berbagai literatur ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk teori gatekeeping dari Kurt Lewin dan Pamela Shoemaker, serta penelitian-penelitian sebelumnya terkait media lokal dan kebijakan redaksi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis memiliki dasar teori dan posisi ilmiah yang kuat.

b. Validasi Kontekstual Media Lokal

Peneliti juga menyesuaikan dan menguji data melalui pembacaan mendalam terhadap berita-berita politik yang telah diterbitkan Harian Palopo Pos selama periode penelitian. Dengan membandingkan kebijakan redaksi yang dijelaskan dalam wawancara dan observasi terhadap konten aktual media, peneliti dapat memverifikasi konsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan.

c. Triangulasi Data

Proses validasi juga melibatkan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode seperti tersebut telah digunakan peneliti sehingga dapat mengidentifikasi potensi bias atau ketidakkonsistenan dalam data yang dikumpulkan, serta memperkuat keandalan hasil penelitian.

d. Validasi melalui Umpan Balik Terbatas (*Mini Member Check*)

Sebagian hasil temuan awal dikonfirmasi kembali secara informal kepada narasumber utama untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan perspektif mereka terwakili secara akurat.

Pendekatan validasi yang tidak hanya berbasis lapangan tetapi juga didukung oleh studi literatur dan analisis isi media, diharapkan hasil penelitian ini memiliki akurasi dan integritas yang tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam kajian komunikasi politik dan jurnalisme media lokal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Palopo Pos

Harian Palopo Pos adalah salah satu media cetak terkemuka yang beroperasi di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2000, media ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, seimbang, dan terpercaya, terutama dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang di wilayah Luwu Raya. Sebagai media lokal, Harian Palopo Pos berkomitmen untuk menjadi sumber berita utama bagi masyarakat, dengan fokus pada pemberitaan yang tidak hanya informatif tetapi juga mendidik. Hal ini penting dalam membangun partisipasi publik dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

Kantor Harian Palopo Pos terletak di Jl. Andi Djemma, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, yang berada di pusat kota. Lokasi strategis ini memudahkan akses bagi masyarakat dan narasumber, sehingga memfasilitasi interaksi yang erat antara media dan berbagai elemen pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Fasilitas yang tersedia di kantor, seperti ruang redaksi yang modern dan sistem jaringan internet yang cepat,

mendukung operasional tim redaksi dalam melakukan riset, penulisan, dan pengeditan berita secara efisien.

Pada konteks pemilu, Harian Palopo Pos memegang peranan penting sebagai sumber informasi politik bagi masyarakat Palopo dan sekitarnya. Redaksi media ini harus mampu menyaring berbagai informasi politik yang masuk, memastikan bahwa setiap berita yang dimuat telah melalui proses verifikasi dan memenuhi standar kelayakan berita yang objektif dan berimbang. Senantiasa memperhatikan dinamika lokal dan tantangan yang dihadapi, seperti tekanan dari aktor politik, media ini berusaha menjaga kualitas dan integritas pemberitaannya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk memahami bagaimana kebijakan redaksi Harian Palopo Pos dalam melakukan *gatekeeping* terhadap berita politik, terutama menjelang pemilu 2024.

2. Lokasi dan Fasilitas

Kantor Palopo Pos terletak di Jl. Andi Djemma, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi ini sangat strategis, berada di pusat kota yang memudahkan akses bagi masyarakat dan narasumber. Kedekatan dengan berbagai institusi pemerintah, lembaga pendidikan, serta pusat kegiatan masyarakat memungkinkan Palopo Pos untuk menjalin hubungan yang erat dengan berbagai elemen pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Fasilitas yang tersedia di

kantor Palopo Pos sangat mendukung operasional tim redaksi. Ruang redaksi yang luas dilengkapi dengan perangkat komputer modern dan sistem jaringan internet yang cepat. Hal ini memfasilitasi wartawan dalam melakukan riset, penulisan, dan pengeditan berita secara efisien. Selain itu, studio fotografi disediakan untuk memenuhi kebutuhan visual berita, memungkinkan setiap laporan tidak hanya informatif tetapi juga menarik secara visual. Ruang rapat yang nyaman juga disediakan untuk diskusi dan perencanaan editorial, di mana tim dapat membahas isu-isu terkini dan menentukan berita yang akan diangkat.

3. **Komitmen terhadap Kualitas Pemberitaan**

Palopo Pos memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas pemberitaan. Media ini berusaha untuk menyajikan berita yang faktual, berimbang, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap edisi, Palopo Pos mengangkat isu-isu lokal yang penting, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Utamanya keakuratan dan integritas, Palopo Pos telah membangun reputasi sebagai media yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Redaksi juga berupaya melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum di publikasikan, memastikan bahwa berita yang disajikan adalah hasil dari investigasi yang mendalam³⁰.

³⁰ Adnan Rinaldi Ismail, "Analisis Kualitas Layana Kuri Dan Logistik Pada Pengguna Pengiriman Paket PT.Pos Indonesia Di Kota Palopo," *Manajemen Bisnis*, 2023, 18–29.

4. Pengaruh Terhadap Masyarakat

Sebagai media lokal, Palopo Pos memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat di Luwu Raya. Pemberitaan yang dihasilkan tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu penting. Terkait dengan cara ini, Palopo Pos berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemangku kebijakan, mendorong partisipasi publik dalam proses politik, dan meningkatkan kesadaran sosial. Dalam konteks pemilihan umum dan kebijakan publik, Palopo Pos berperan dalam membangun opini yang konstruktif, membantu masyarakat untuk memahami posisi dan program dari calon pemimpin mereka.

5. Visi dan Misi

Visi Palopo Pos adalah untuk menjadi bacaan dan referensi utama di Luwu Raya dan Toraja. Misi ini tercermin dalam upaya untuk menyajikan berita yang aktual dan faktual, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang profesional dan etis, Palopo Pos berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan tetap relevan di era digital yang terus berkembang. Melalui program-program literasi media dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, Palopo Pos juga

berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi yang berkualitas.³¹

6. Profil Informan

N o	Nama Lengkap	Jabatan/Profe si	Instansi/Organis asi	Pengalaman/Per an Relevan	Keteranga n Penelitian
1	Dr. H. Firmanza D.P., SH., M.Si	Penjabat (PJ) Wali Kota Palopo	Pemerintah Kota Palopo	Birokrat dengan pengalaman panjang di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan	Informan dari unsur pemerintah daerah
2	Arsul, S.Pd	Wartawan Harian Palopo Pos	Media Lokal – Harian Palopo Pos	Jurnalis aktif meliput isu politik, sosial, dan kebijakan publik di Palopo	Informan dari unsur media lokal
3	Alfri Jamil, S.E., M.Si.	Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo	DPRD Kota Palopo	Legislator dengan pengalaman politik dan kebijakan publik	Informan dari unsur legislative
4	Ikhwan Ibrahim, S.E.	Editor Harian Palopo Pos	Media Lokal – Harian Palopo Pos	Editing, berpengalaman dalam pengambilan mengolah informasi	Informan dari unsur media (pengambil keputusan redaksi)
5	Idris Prasetiawan, S.Kel	Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos	Media Lokal – Harian Palopo Pos	Redaktur senior, memiliki otoritas dalam penentuan arah pemberitaan	Informan dari unsur media (pimpinan redaksi)

³¹ AMIR, “Strategi Bisnis Media : Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos.” *Manajemen Bisnis*, 2023, 18–29.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penyaringan Berita Politik oleh Tim Redaksi Harian Palopo Pos pada Pemilu 2024

Dalam menyajikan berita politik, Harian Palopo Pos menerapkan proses penyaringan yang dilakukan secara ketat oleh tim redaksi dengan mengacu pada standar jurnalistik serta relevansi isu bagi publik. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan berita, hingga finalisasi berita oleh redaktur. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pemberitaan, menghindari berita yang bersifat provokatif atau menjelekkan pihak tertentu, serta memastikan informasi yang diterbitkan berkontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan daerah.

Proses penyaringan yang ketat mencerminkan penerapan prinsip *gatekeeping* dalam jurnalisme, di mana media tidak hanya berperan sebagai penerus informasi, tetapi juga sebagai filter yang menentukan berita mana yang layak dan bermanfaat untuk publik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arsul selaku wartawan harian Palopo pos yang menyebutkan:

“Jadi, kami itu sebelum mengangkat sebuah berita, pertama adalah melakukan rapat perencanaan, rapat perencanaan adalah menentukan berita yang akan kita angkat. Pada umumnya kalau berita politik itu tidak ada bedanya dengan berita pada segmen lainnya, seperti berita masalah hukum, dan pendidikan, nah yang mendasar disini adalah menentukan dulu, ada namanya menentukan

seperti apa berita yang mau kita angkat, di redaksi itu ada namanya rapat proyeksi.”³²

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses editorial melalui rapat perencanaan dan rapat proyeksi menjadi mekanisme penting dalam menjaga kualitas berita. Dengan mengacu pada standar jurnalistik, tim redaksi mampu menjaga kredibilitas dan integritas pemberitaan politik, yang sangat berpengaruh pada opini dan keputusan masyarakat terutama pada masa Pemilu. Pendekatan ini juga menandakan kesadaran redaksi tentang tanggung jawab sosial media sebagai pilar demokrasi dengan mengedepankan berita yang konstruktif dan edukatif.

Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, Idris Prasetiawan S.Kel, menjelaskan bahwa penyaringan berita politik didasarkan pada penilaian terhadap isu dan narasumber yang diangkat. Caleg yang mengangkat isu aktual, seperti pembangunan infrastruktur desa terpencil atau pemberdayaan nelayan di pesisir, menjadi fokus perhatian redaksi untuk diangkat sebagai berita. Sebaliknya, berita yang berisi pencemaran nama baik atau kritik negatif yang tidak membangun terhadap pemerintah tidak diloloskan untuk diterbitkan.

“Kita dalam menyaring berita politik itu dilihat dari isu narasumbernya siapa, dan isi berita, kebanyakan kemarin tokoh-tokoh yang maju caleg dalam pileg itu kan banyak yang melontarkan isu-isu seperti misalnya membuat jembatan, dan itu kami anggap menarik. apalagi kalau calegnya dari salah satu daerah terpencil di luwu raya itu akan mengangkat isu aktual, atau apa yang dibutuhkan masyarakat di sana, itu yang bisa kita angkat

³² Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

naik dalam berita, dan mereka ingin diberitakan sehingga mereka menghubungi wartawan Palopo Pos, lalu kita selaku wartawan ke sana. Kalau soal berita yang tidak layak naik itu adalah berita yang menjelek-jelekkan orang, atau menjelek-jelekkan pemerintahan. Itu yang kita tidak angkat, yang penting seputar kemajuan daerah dan siap untuk membangun daerah, yah itu kita publikasikan."³³

Ungkapan ini mengungkapkan pentingnya seleksi konten berita berdasarkan nilai berita dan dampak sosialnya. Fokus redaksi pada isu-isu pembangunan dan pemberdayaan menunjukkan orientasi pada pemberitaan yang memberdayakan masyarakat (*empowering journalism*). Dengan memilih narasumber yang kredibel dan isu yang relevan dengan kebutuhan lokal, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membangun narasi positif dan solusi atas permasalahan masyarakat.



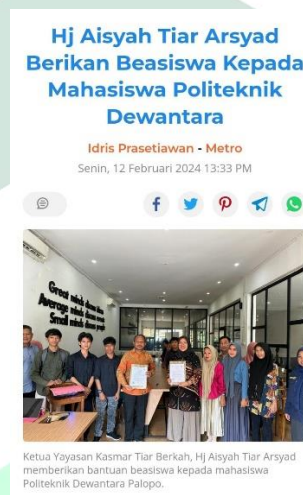
Gambar 4.1 Kegiatan Road Show Caleg di Kabupaten Luwu³⁴

kegiatan *road show* yang dilakukan oleh Irbar Pairing Senobua, seorang calon legislatif dari PDIP, di Kabupaten Luwu. Kegiatan ini mencerminkan upaya aktif calon legislatif untuk mendekatkan diri kepada

³³ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos. *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

³⁴ Kegiatan Road Show Caleg di Kabupaten Luwu, 24 Desember 2023, [Irbar Pairing Sisir Obyek Wisata Pasir Putih Larompong - PALOPOPOS](#)

masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung. Dengan melibatkan elemen-elemen lokal seperti obyek wisata, pemberitaan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan konteks yang relevan dan membangun narasi positif bagi masyarakat.



4.2 Berita Politik di Harian Palopo Pos³⁵

Pemberitaan ini menunjukkan bagaimana redaksi Palopo Pos lebih menekankan pada isu-isu yang memiliki nilai sosial dan relevansi langsung dengan masyarakat. Pemilihan isu pembangunan dan kegiatan sosial dari seorang calon legislatif menggambarkan praktik *gatekeeping* yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik semata, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, media tidak hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga fungsi edukatif dan solutif melalui konstruksi narasi yang membangun.

³⁵ Berita Politik di Harian Palopo Pos, 12 Februari 2024 [Hj Aisyah Tiar Arsyad Berikan Beasiswa Kepada Mahasiswa Politeknik Dewantara - PALOPOPOS](#)

Penolakan terhadap berita yang bersifat fitnah atau kampanye hitam adalah wujud etika jurnalistik yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan menghindari konflik sosial yang tidak perlu, Idris menerangkan mekanisme koordinasi antara reporter dan redaktur yang berjalan secara berkelanjutan. Reporter bertugas mengumpulkan berita di lapangan, kemudian menyerahkannya kepada redaktur yang akan mengevaluasi isi berita sebelum diterbitkan. Jika berita dirasa kurang menggugah atau kurang lengkap, redaktur memberikan arahan untuk melengkapi narasumber dan memperkaya isi berita agar sesuai dengan standar pemberitaan.

“Proses penyaringan berita politik melibatkan reporter di lapangan, setelah reporter mendapatkan berita, kemudian dikirim ke redaktur dan nanti redaktur akan membaca dulu keseluruhan tulisan, memahami apa maksud dari si reporter, dan kalau pun isinya masih biasa-biasa saja, paling kita minta untuk dilengkapi lagi dan diperkaya lagi isunya, dengan menambah beberapa narasumber, sehingga dari isu sosok seorang redaktur akan memberikan arahan pada reporter mengenai hal-hal apa saja yang perlu diangkat atau ditayangkan kepada para calon legislatif dalam berita sehingga bisa lebih terarah beritanya. jadi tidak asal bikin berita dan mengangkat isu-isu yang tidak bisa diterima di masyarakat.”³⁶

Mekanisme koordinasi antara reporter dan redaktur ini merupakan praktik ideal dalam proses produksi berita yang berorientasi mutu. Melibatkan redaktur dalam proses evaluasi membantu memastikan berita tidak hanya lengkap secara faktual tetapi juga sesuai konteks dan relevan bagi masyarakat.

³⁶ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos. *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025



Gambar 4.3 Komentar Pak Idris Prasetiawan tentang Isu Aktual Caleg³⁷

Hal ini mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap isu-isu yang diangkat oleh calon legislatif, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Komentar Pak Idris Prasetiawan mengenai perlunya pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai platform untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Instruksi untuk memperkaya berita menandakan adanya penerapan prinsip keberimbangan dan kedalaman peliputan (*depth reporting*) yang sangat penting dalam pemberitaan politik untuk menghindari bias dan simplifikasi isu. Peran redaktur sebagai pengendali isi berita selaras dengan fungsi *gatekeeper* yang memastikan informasi yang disampaikan bermutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Editor Harian Palopo

³⁷ Komentar Pak Idris Prasetiawan tentang Isu Aktual Caleg, 12 Februari 2024, <https://palopopos.fajar.co.id/2023/09/01/luwu-raya-masih-butuh-banyak-infrastruktur-ini-yang-disampaikan-muhammad-fauzi-ke-menteri-pupr/>

Pos, Ikhwan Ibrahim, S.E., menambahkan bahwa sebelum berita dapat diterbitkan, berita harus memenuhi kaidah jurnalistik dan tidak berimplikasi hukum. Penilaian akhir dilakukan oleh redaktur dan dapat didiskusikan melalui media komunikasi internal seperti grup WhatsApp untuk persetujuan cepat.

“Alurnya itu kan, kita mulai dari perencanaan, bahwa kita mau mengambil berita ini, oleh wartawan, selanjutnya wartawan meliput, setelah meliput maka wartawan menulis berita itu, setelah beritanya ditulis lalu diserahkan ke redaktur, lalu redaktur menilai apakah sudah layak dimuat, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, apakah tidak berimplikasi di hukum, setelah dianggap sudah tidak ada masalah maka itu sudah bisa diterbitkan.”³⁸

Lalu Pak Ikhwan Ibrahim, juga menambahkan :

“Terkait rapat redaksi khusus dalam menentukan berita politik yang layak tayang kalau kita di sini sudah tidak ada, yang ada tinggal berita itu diperlihatkan di grup WA, kalau di grup WA para tim sudah katakan oke maka sudah bisa diberitakan, diperiksa dulu apakah sudah lengkap, itu yang dilakukan sebelum berita itu diterbitkan atau dicetak.”³⁹

Penggunaan media komunikasi digital seperti grup *WhatsApp* untuk koordinasi menunjukkan adaptasi redaksi terhadap dinamika jurnalisme modern yang membutuhkan respon cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas kontrol. Namun, keberlangsungan pengawasan tetap mengedepankan keputusan kolektif demi mempertahankan standar berita. Reporter politik, Arsul S.Pd., juga menegaskan peran rapat perencanaan (rapat proyeksi) yang digelar sebelum peliputan sebagai bentuk penentuan tema dan fokus berita yang akan diangkat. Proses ini

³⁸ , Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

³⁹ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

memastikan berita yang diangkat senada dengan arahan pimpinan redaksi dan tetap mengutamakan akurasi serta keberimbangan narasumber. Pak Arsul:

“Setelah mendapat arahan khusus dari pimpinan redaksi, kami turun lapangan untuk meliput isu politik dengan memperhatikan arah yang diberikan, seperti misalnya narasumber pasti yang bersangkutan, atau fokus pada wacana yang berkembang di tengah masyarakat.”⁴⁰

Keputusan redaksi dalam menentukan berita politik tidak hanya melibatkan pertimbangan teoretis, tetapi juga melibatkan proses praktis yang ketat di lapangan. Pemilihan topik tentang program pendidikan dan evaluasi hasil belajar menggambarkan praktik *gatekeeping* yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan informasi yang relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, media tidak hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Setiap berita yang akan dimuat harus melalui seleksi yang menyeluruh, mulai dari pemilihan narasumber hingga memastikan berita tersebut seimbang dan relevan. Proses ini mengharuskan reporter untuk mematuhi pedoman editorial yang telah ditetapkan oleh pimpinan redaksi. Dalam hal ini, reporter memainkan peran penting dalam memastikan bahwa isu yang diangkat sesuai dengan arahan yang diberikan dan dapat memberikan dampak yang besar pada audiens. Terlebih lagi, dengan adanya batas waktu yang ketat, reporter diharapkan dapat menyaring berita

⁴⁰ Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

dengan cepat, namun tetap menjaga kualitas dan objektivitas yang tinggi.

Lalu Pak Arsul juga menambahkan:

“Pada proses penyaringan berita politik, reporter terlibat dalam batas waktu yang ketat, semua berita harus disetor sebelum jam 5 sore. Berita yang kurang menarik atau belum memenuhi unsur seperti narasumber dan keberimbangan akan diperbaiki terlebih dahulu agar layak tayang.”⁴¹

Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas pemberitaan politisi tidak hanya ditentukan saat penulisan, tetapi juga bermula sejak tahap perencanaan yang sistematis dan terarah. Rapat proyeksi menjadi wahana kontrol awal untuk menetapkan agenda berita yang relevan dan mengurangi risiko bias atau berita sampingan yang tidak berkontribusi. Batasan waktu dan proses pengeditan berulang mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan berita dan memastikan proses produksi berita tetap efisien tanpa mengorbankan mutu. Hal ini sejalan dengan model newsroom modern yang mengintegrasikan rutinitas koordinasi dan *feedback* sebagai kunci keberhasilan produksi berita berkualitas.

Secara keseluruhan, proses penyaringan berita politik di Harian Palopo Pos mencerminkan prinsip *gatekeeping* jurnalistik yang bertujuan mengontrol kualitas informasi yang sampai ke masyarakat. Dengan menyeleksi isu yang relevan dan narasumber yang kredibel, penyaringan ini juga menjadi mekanisme perlindungan terhadap pemberitaan negatif yang dapat memicu konflik sosial atau persepsi bias. Selain itu, penguatan

⁴¹ Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

peran redaktur dan kinerja reporter dalam proses editorial meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas jurnalistik.

Dengan berlangsungnya proses editorial yang ketat Harian Palopo Pos menunjukkan komitmen terhadap pemberitaan politik yang berkualitas, berimbang, dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi yang dapat dipercaya dan menjadi sumber informasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Model penyaringan dan penyuntingan berita yang diterapkan memberi contoh nyata bagaimana media lokal mampu menjalankan fungsinya secara optimal di tengah dinamika politik nasional yang menegangkan, khususnya menjelang Pemilu. Ini sekaligus menjawab tantangan media masa kini yaitu menjaga keseimbangan antara kecepatan dalam menyajikan berita dan ketelitian dalam memastikan kualitas dan integritas informasi.

2. Kebijakan *Gatekeeping* dalam Penentuan Berita Politik di Harian Palopo Pos

Kebijakan *gatekeeping* merupakan proses seleksi dan penyaringan berita yang sangat penting dalam menjaga mutu pemberitaan, terutama pada berita politik yang rawan bias dan propaganda. Di Harian Palopo Pos, *gatekeeping* dilaksanakan dengan melibatkan beberapa aktor utama seperti reporter, redaktur, pimpinan redaksi, dan manajemen tertinggi. Melalui koordinasi dan regulasi internal ini, redaksi memastikan berita yang

diterbitkan sesuai dengan standar jurnalistik, objektif, dan tidak memihak, namun tetap memberikan ruang bagi isu-isu yang relevan dan bernilai berita tinggi. Mekanisme ini juga didasarkan pada pedoman editorial yang mengacu pada kaidah jurnalistik dan regulasi pers yang berlaku di Indonesia.

Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, Idris Prasetiawan S.Kel, menyatakan bahwa proses *gatekeeping* diawali oleh reporter yang bertugas mengumpulkan berita di lapangan. Selanjutnya, redaktur membaca dan mengevaluasi isi berita untuk memastikan apakah sudah memenuhi standar isi dan kualitas yang diinginkan. Jika diperlukan, redaktur memberikan arahan untuk melengkapi informasi dan menambah narasumber agar berita tidak hanya kaya akan data tetapi juga terarah sesuai isu yang diperlukan.

“Yang terlibat dalam proses penyaringan berita yaitu Reporter di lapangan, setelah reporter mendapatkan berita, kemudian dikirim ke redaktur dan nanti redaktur akan membaca dulu keseluruhan tulisan, memahami apa maksud dari si reporter, dan kalau pun isinya masih biasa-biasa saja, paling kita minta untuk dilengkapi lagi dan diperkaya lagi isunya, dengan menambah beberapa narasumber, sehingga dari isu sosok seorang redaktur akan memberikan arahan pada reporter mengenai hal-hal apa saja yang perlu diangkat atau ditayangkan kepada para calon legislatif dalam berita sehingga bisa lebih terarah beritanya.”⁴²

Penjelasan Idris tersebut menegaskan peran sentral redaktur dalam *gatekeeping*, khususnya dalam menambah dan memperkaya isi berita agar lebih bernilai dan kontekstual. Hal ini mencerminkan praktik editorial

⁴² Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

yang proaktif untuk memastikan keberimbangan informasi, meningkatkan kualitas pemberitaan, dan menghindari peliputan yang dangkal. Redaksi berkomitmen untuk memilih berita yang memenuhi kriteria tertentu, seperti sumber yang valid dan terbaru, serta bobot berita yang relevan dengan isu yang sedang berkembang. Hal ini mencerminkan kesadaran redaksi akan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan kualitas pemberitaan, terutama dalam konteks politik yang sensitif.

Dalam konteks teori media, ini juga menunjukkan fungsi *gatekeeping* sebagai kontrol sosial dan mekanisme penyaringan berita yang memfilter informasi yang layak kepada publik. Adapun standar editorial yang digunakan dalam penilaian berita politik menurut Idris antara lain sumber berita yang harus valid dan terbaru, bobot berita yang sedang tren atau viral sehingga mendapatkan perhatian publik, kesesuaian dengan fakta di lapangan, dan pemenuhan unsur 5W + 1H (*What, Who, When, Where, Why, How*). Standar ini menjadi pedoman untuk menjaga objektivitas, relevansi, dan kelengkapan isi berita yang diterbitkan.

“Standar editorial yang digunakan dalam menilai berita politik yaitu pertama adalah sumber. Sumber terbaru informasi sangat penting untuk kita ketahui, harus sesuai dengan isu tersebut kemudian yang kedua adalah bobot berita lebih viral, artinya berita itu lagi trending di perbincangkan, maka kita lebih memilih berita seperti itu, kemudian yang ketiga adalah kaidah yang sesuai dengan fakta, fakta di lapangan sangat memengaruhi hasil berita kemudian terakhir adalah sesuai dengan rumus 5 W + 1 H, yang

memperjelas terkait What, Who, When, Where, Why, kemudian How."⁴³

Standar editorial yang dijabarkan oleh Idris menegaskan setiap pemberitaan harus berakar pada data faktual dan sumber yang kredibel. Ini juga mempertimbangkan popularitas berita tanpa mengabaikan aspek kebenaran dan keberimbangan. Kebijakan ini selaras dengan kaidah jurnalistik profesional yang berlaku, terutama dalam pemberitaan politik yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini publik.

Dalam konteks netralitas dan integritas pemberitaan, Idris juga menerangkan proses rapat redaksi dan pengawasan ketat yang dilakukan guna menjamin berita politik yang diterbitkan tetap bersifat objektif dan tidak memihak pihak manapun. Selain itu, dalam menghadapi tekanan dari partai politik atau tim sukses, redaksi tetap berupaya menuliskan berita sesuai permintaan tanpa melanggar aturan jurnalistik dan menjunjung netralitas serta etika pemberitaan.

*"Redaksi memastikan bahwa berita politik yang disaring tetap netral, faktual, dan tidak memihak dengan melakukan rapat redaksi dan pengawasan secara ketat sebelum berita diterbitkan."*⁴⁴

Lalu pak Idris menambahkan :

"Jika mendapat tekanan dari partai politik atau tim sukses dalam proses penyaringan berita politik, kami mengakomodir keinginan caleg, artinya menuliskan berita yang sesuai permintaan, namun tidak melanggar aturan dalam membuat berita; artinya kita tetap

⁴³ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

⁴⁴ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

*netral dalam menuliskan berita. Tidak menyinggung partai yang lain, sehingga interfensi tidak terjadi."*⁴⁵

Pengelolaan tekanan eksternal ini menunjukkan bahwa Harian Palopo Pos menjalankan fungsi *gatekeeping* tidak hanya sebagai penyaring berita, tetapi juga sebagai penjaga independensi media. Komitmen terhadap netralitas dan profesionalisme ini *krusial* supaya informasi yang disebarluaskan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan konflik atau bias politik.

Editor Harian Palopo Pos, Ikhwan Ibrahim, S.E., menambahkan bahwa pengambilan keputusan akhir dalam proses *gatekeeping* tidak hanya melibatkan reporter dan redaktur, tetapi juga pimpinan redaksi dan direktur yang mengikuti rapat penilaian berita. Validasi terhadap keabsahan sumber, kelayakan berita dari sisi hukum dan etika, serta penerapan kode etik jurnalistik menjadi kunci dalam menentukan apakah sebuah berita dapat dimuat atau tidak.

*"Pihak yang terlibat dalam gatekeeping adalah wartawan, redaktur, pimpinan redaksi, dan direktur yang memimpin rapat penilaian berita. Redaktur menentukan kelayakan berita berdasarkan kaidah jurnalistik dan hukum, serta validasi sumber informasi yang sesuai konteks."*⁴⁶

Pak Ikhwan Ibrahim juga menambahkan bahwa :

"Pedoman editorial mengacu pada kode etik jurnalistik: fakta harus jelas, profesional, dan tidak pribadi. Standar undang-

⁴⁵ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

⁴⁶ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

*undang pers juga diterapkan, jika berita fitnah maka akan berpotensi dilaporkan."*⁴⁷

Ikhwan juga menyoroti penerapan kebijakan media terkait advertorial, di mana media memberikan ruang sesuai kebutuhan bisnis tanpa mengorbankan integritas editorial. Jika sebuah berita memiliki sumber tidak jelas atau belum terverifikasi, media menangguk publikasinya hingga data kuat didapat, contohnya dari BAWASLU.

*"Untuk berita advertorial, media memberikan porsi tertentu sesuai kebijakan bisnis."*⁴⁸

Pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek bisnis dan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan politik menjadi perhatian utama bagi redaksi. Media tidak hanya berperan sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan akurasi dan kredibilitas setiap berita yang disajikan kepada publik. Dalam konteks ini, kebijakan editorial yang jelas dan prosedur verifikasi yang ketat diterapkan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan komitmen media untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa berita yang di publikasikan tidak hanya menarik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik. Pak Ikhwan juga menambahkan :

*"Jika berita tidak jelas sumber dan tidak terverifikasi, berita akan dipending dan tidak dimuat, kecuali ada data kuat dari sumber resmi seperti BAWASLU."*⁴⁹

⁴⁷ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

⁴⁸ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

⁴⁹ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

Pernyataan ini menunjukkan keberadaan keseimbangan antara kebutuhan bisnis media dan tanggung jawab sosialnya dalam menjaga kualitas serta kejujuran pemberitaan politik. Hal ini juga menegaskan bahwa media tidak menyediakan ruang untuk berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencegah penyebaran misinformasi.

Reporter politik, Arsul S.Pd., menyatakan bahwa para wartawan wajib menjaga netralitas dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pihak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers yang berlaku. Selain itu, Arsul menekankan pentingnya menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan lembaga resmi seperti KPU dan BAWASLU sebagai sumber terpercaya dan mitra media dalam pemilu.

“Wartawan wajib menjaga netralitas, tidak memihak, dan memberikan pelayanan yang sama pada semua pihak sesuai kode etik dan undang-undang pers.”⁵⁰

Pak Arsul menambahkan bahwa :

“Kami juga menjaga hubungan baik dan kerja sama dengan KPU dan BAWASLU sebagai sumber resmi dan mitra pers dalam penyelenggaraan pemilu.”⁵¹

Kepatuhan wartawan terhadap prinsip netralitas dan kemitraan dengan lembaga resmi merefleksikan praktik jurnalistik yang akuntabel dan profesional. Kolaborasi ini menjadi penjamin kredibilitas informasi, sekaligus mendukung proses demokrasi yang transparan dan jujur. kebijakan *gatekeeping* di Harian Palopo Pos dijalankan dengan mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyaringan

⁵⁰ Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

⁵¹ Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

berita politik. Peran reporter, redaktur, pimpinan redaksi, dan manajemen menunjukkan koordinasi yang kuat untuk memastikan kualitas, objektivitas, dan netralitas berita yang diterbitkan. Standar editorial yang ketat, termasuk validasi sumber, pemenuhan unsur jurnalistik 5W + 1H, serta perlakuan adil terhadap tekanan eksternal, menjadi landasan penting dalam menjaga kredibilitas media. Selain itu, keterbukaan terhadap permintaan pihak terkait tetap diatur dalam koridor etika jurnalistik agar tak menimbulkan bias atau konflik kepentingan. Dengan menjalin kerja sama erat dengan lembaga resmi seperti KPU dan BAWASLU, Harian Palopo Pos juga menunjukkan komitmen pada akurasi dan integritas pemberitaan pemilu. Secara keseluruhan, kebijakan *gatekeeping* yang diterapkan membantu media ini berperan secara efektif sebagai pilar demokrasi yang memberikan informasi politik yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Redaksi dalam Menentukan Berita Politik

Keputusan redaksi dalam menentukan berita politik merupakan hasil dari pertimbangan berbagai faktor yang berimbang antara kualitas jurnalistik dan kebutuhan bisnis media. Berita yang akan dimuat harus memenuhi kriteria faktualitas, relevansi, daya tarik, dan nilai edukatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, faktor viralitas dan tren serta aspek advertorial juga turut memengaruhi posisi berita dalam media. Upaya menjaga netralitas dan keberimbangan pemberitaan menjadi

tantangan tersendiri agar media tidak berpihak dan terhindar dari berita sensasional yang bersifat provokasi. Faktor tersebut selaras dengan teori *gatekeeping* dan *news values* yang menekankan bahwa seleksi berita melibatkan penilaian kritis terhadap nilai berita dan dampak sosia.. Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, Idris Prasetiawan S.Kel, menyatakan

“Syarat utama berita dimuat adalah bersifat faktual, sesuai fakta lapangan, menarik untuk dibaca, mengandung nilai edukasi dan pesan baik untuk masyarakat, serta narasumber yang relevan.”⁵²

Lalu ia menambahkan bahwa

“Faktor lain adalah viralitas dan bobot berita, berita yang sedang trending lebih diprioritaskan.”⁵³

Hal ini menunjukkan bagaimana media beradaptasi dengan perubahan cepat dalam konsumsi informasi, di mana berita yang viral dapat menarik lebih banyak pembaca dan memperluas jangkauan media. Meskipun kualitas jurnalistik tetap menjadi prioritas, media juga harus memperhatikan daya tarik berita yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Pak Idris Prasetiawan juga mengemukakan

“Periklanan atau advertorial politik juga memengaruhi karena berita tersebut ditempatkan khusus di bagian Headline, mendukung perekonomian perusahaan sehingga berhubungan dengan bisnis media.”⁵⁴

⁵² Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

⁵³ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

⁵⁴ Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

Aspek bisnis media juga memainkan peran penting dalam keputusan redaksi, terutama terkait dengan periklanan atau advertorial politik. Berita yang memiliki unsur iklan politik sering kali ditempatkan di bagian *headline*, mengingat dampaknya terhadap pendapatan media. Selain itu, pola penempatan berita politik yang dipengaruhi oleh faktor bisnis semakin tampak jelas melalui hadirnya advertorial atau iklan politik. Redaksi media sering memberikan ruang khusus bagi tokoh atau kandidat politik untuk menyampaikan pesan mereka secara langsung dalam bentuk advertorial berbayar. Kehadiran iklan politik ini tidak hanya menjadi strategi komunikasi politik bagi kandidat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan media. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan iklan politik dalam media massa menjadi bukti konkret terkait faktor bisnis berperan dalam keputusan redaksi.



Gambar 4.4 Tampilan advertorial politik pada media cetak lokal yang memperlihatkan bagaimana faktor bisnis, khususnya iklan politik, memengaruhi penempatan konten dalam pemberitaan.

Gambar di atas menunjukkan bentuk nyata advertorial politik yang ditempatkan dalam media cetak lokal. Kehadiran advertorial semacam ini memperlihatkan bagaimana media memberikan ruang bagi aktor politik untuk menyampaikan pesan mereka sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan pers. Praktik ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara kebutuhan politik kandidat dengan kepentingan bisnis media. Penempatan ini tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi perusahaan media. Dengan demikian, meskipun pemberitaan harus tetap mengutamakan kualitas dan objektivitas, kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan bisnis media tidak bisa diabaikan. Pak Idris menambahkan

“Tantangan menjaga objektivitas dan integritas terletak pada menjaga keberimbangan, tidak menyinggung SARA, dan tidak menghasut pihak manapun serta melakukan cek dan recek informasi.”⁵⁵

Pernyataan Idris menjadi titik awal penting yang menggarisbawahi filosofi redaksi dalam menjaga kualitas jurnalistik sekaligus memperhatikan aspek bisnis media yang tak terhindarkan. Fakta lapangan dan relevansi narasumber menjadi landasan utama yang mencerminkan prinsip *gatekeeping* yang ketat, di mana seleksi berita bukan hanya soal apa yang menarik tetapi juga valid dan bermanfaat bagi publik. Namun, adanya penekanan pada faktor viralitas dan berita trending menunjukkan

⁵⁵ Idris Prasetyawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *Wawancara*, Palopo 11 Juli 2025

bahwa redaksi juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan konsumsi media digital dan kebutuhan audiens yang dinamis.

Di sisi lain, pengakuan terhadap pengaruh advertorial yang menempati posisi strategis di depan halaman memperlihatkan realitas ekonomi media yang memengaruhi kebijakan editorial, mencerminkan teori political economy of media bahwa bisnis media tidak bisa dibebaskan dari pengaruh finansial dalam proses produksi berita. Namun demikian, komitmen redaksi untuk menjaga keberimbangan, menghindari konten yang menyinggung SARA, dan melakukan verifikasi ketat mempertegas integritas jurnalistik yang menjadi penyeimbang dinamika bisnis dan moral media. Dengan demikian, pernyataan Idris sekaligus membuka ruang dialog antara teori dan praktik dalam menentukan berita politik. Editor Harian Palopo Pos, Ikhwan Ibrahim, S.E mengemukakan

“Kriteria dalam memilih berita politik adalah fakta, keberimbangan, tokoh sentral, kedekatan geografis, viralitas isu, serta unsur menarik dan heboh yang bisa mengundang perhatian pembaca.”⁵⁶

Pak Ikhwan Ibrahim juga menambahkan

“Redaksi sangat memperhatikan konfirmasi semua pihak jika ada yang dirugikan agar berita tetap berimbang dan tidak memihak.”⁵⁷

Pernyataan Ikhwan memperluas dimensi seleksi berita dengan menambahkan faktor kedekatan geografis sebagai kunci resonansi berita

⁵⁶ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

⁵⁷ Ikhwan Ibrahim, S.E, Editor Harian Palopo Pos, *Wawancara* Palopo 7 Juli 2025

politik di tingkat lokal. Ini sangat relevan dengan teori audience segmentation, di mana penyesuaian konten dengan karakteristik khalayak lokal meningkatkan tingkat keterlibatan pembaca dan memperkuat kredibilitas media di komunitasnya. Aspek viralitas dan berita dengan unsur "heboh" juga tidak dipandang remeh, sebab potensi menarik perhatian pembaca adalah bagian dari nilai berita yang telah dipaparkan. Pentingnya konfirmasi merata dari semua pihak yang terkait membuktikan implementasi praktis dari prinsip etika jurnalistik dan teori framing, yang berusaha mengikis bias dan memperkuat keberimbangan narasi. Konfirmasi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol internal redaksi untuk mencegah distorsi fakta dan menghindari pemberitaan yang merugikan pihak tertentu, sekaligus menjaga kepercayaan publik dalam situasi politik yang penuh polarisasi. Pernyataan Ikhwan menunjukkan bagaimana teori dan praktik bertemu secara harmonis dalam mengembangkan standar editorial berita politik. Arsul S.Pd selaku Reporter menambahkan

“Prinsip wartawan adalah menjaga keberimbangan, independen, dan netral dalam setiap pemberitaan agar memberikan edukasi sekaligus informasi yang bermanfaat untuk masyarakat terkait pemilu.”⁵⁸

Lalu ia menambahkan

“Tekanan dari eksternal seperti partai politik sering terjadi, namun semua penyajian berita harus berimbang dan tidak memihak.”⁵⁹

⁵⁸ Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

⁵⁹ Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, *Wawancara*, 7 Juli 2025

Arsul menjelaskan sebuah aspek yang sangat krusial dalam dunia jurnalistik yakni independensi redaksi di tengah berbagai tekanan politik yang memang nyata dalam konteks pemberitaan politik. Hal ini menegaskan pentingnya profesionalisme, etika, dan integritas yang telah menjadi fondasi teori jurnalistik modern menurut Kovach & Rosenstiel. Sikap redaksi yang tetap mampu menjaga keberimbangan di bawah tekanan juga menunjukkan keteguhan media sebagai pilar demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab. Perjuangan mempertahankan netralitas ini tidak hanya menjadi tantangan internal tetapi juga merupakan aspek krusial yang menentukan kredibilitas media dalam menghadapi serangkaian lobi dan kepentingan politik. Dengan demikian, peran media tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi agen edukasi yang objektif demi tercapainya pemilu yang jujur dan transparan. Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil mengemukakan

“Palopo Pos menyajikan berita yang sangat membantu masyarakat di wilayah Luwu Raya, dengan pemberitaan yang objektif terkait pemilu 2024...”⁶⁰

Lalu Alfri Jamil juga menambahkan

“Klarifikasi terhadap berita yang kurang sesuai biasa dilakukan secara komunikasi langsung dengan penulis dengan metode konfirmasi lewat WA atau telepon.”⁶¹

Untuk memastikan keberimbangan dan akurasi pemberitaan, redaksi melakukan klarifikasi terhadap berita yang kurang sesuai atau

⁶⁰ Alfri Jamil, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, *Wawancara*, 9 Juli 2025

⁶¹ Alfri Jamil, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, *Wawancara*, 9 Juli 2025

menimbulkan ketidakjelasan. Proses klarifikasi ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan penulis berita, menggunakan metode konfirmasi seperti melalui *WhatsApp* atau telepon. Langkah ini memastikan bahwa informasi yang disajikan sudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghindari potensi kesalahan yang bisa merusak kredibilitas media. Alfri Jamil menambahkan

“Keseimbangan pemberitaan sangat terlihat... Kelebihan Palopo Pos adalah pembagian berita per daerah seperti Luwu, Luwu Utara, Palopo, liputan khusus Sulawesi Selatan yang memudahkan pembaca memahami kondisi politik tiap daerah secara terpisah dan jelas.”⁶²

Pernyataan Alfri memaparkan perspektif pengguna media yang menegaskan efektivitas mekanisme klarifikasi dan komunikasi langsung sebagai kunci menjaga akurasi dan kredibilitas berita. Ini juga membuktikan penerapan prinsip etika jurnalistik dan transparansi dalam praktik pemberitaan. Selain itu, strategi segmentasi berita berdasarkan wilayah geografis menunjukkan pendekatan *audience segmentation* yang sangat efektif untuk meningkatkan relevansi konten politik secara lokal dan personal bagi pembaca.

⁶² Alfri Jamil, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, *Wawancara*, 9 Juli 2025



Gambar 4.5 Dokumentasi berita Palopo Pos yang menampilkan liputan khusus di empat wilayah berbeda: Luwu Timur, Luwu, Palopo, dan Luwu Utara

Praktik ini mendukung pandangan Alfri Jamil tentang pentingnya keseimbangan dalam pemberitaan. Segmentasi berdasarkan wilayah geografis memungkinkan Palopo Pos menghadirkan konten politik yang lebih kontekstual, dekat dengan realitas masyarakat, serta mampu mengakomodasi keragaman politik lokal. Dengan cara ini, media tidak hanya berperan sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang responsif terhadap kebutuhan publik di berbagai daerah liputannya.

Pendekatan ini memungkinkan media tidak hanya menjadi perangkat penyebar informasi satu arah, tetapi juga menjadi arena interaksi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Keberhasilan Palopo Pos dalam menerapkan pembagian berita ini sekaligus memperkuat keterhubungan media dengan audiens serta mengakomodasi keragaman politik lokal yang berbeda-beda Penambahan . Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si. selaku PJ Wali Kota Palopo menambahkan sebagai bentuk faktor eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan editorial dalam pemberitaan politik, berikut pernyataan beliau secara lengkap:

*"Saya kira bagus, selama ini kita kerja sama dengan Palopo Pos. Palopo Pos juga memberitakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, informasi-informasi pemerintahan, informasi pembangunan, informasi pelayanan kepada masyarakat, Alhamdulillah selama ini cukup baik dilakoni oleh Palopo Pos untuk bisa sampai ke masyarakat."*⁶³

Pernyataan ini menjadi cerminan sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan media lokal yang berperan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi. Kerja sama ini menciptakan kepercayaan dan mendukung transparansi pemerintahan, sehingga memudahkan masyarakat mendapat informasi pembangunan dan layanan publik secara tepat waktu dan akurat. Hubungan erat ini sekaligus menjadi faktor eksternal yang memperkuat legitimasi dan posisi media dalam sistem komunikasi politik di tingkat lokal. Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si. juga mengemukakan

⁶³ Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si. PJ Wali Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo 24 Juli 2025

*"Tidak ada, karena kita juga percaya pers itu independen, bertanggung jawab dan bisa memberitakan berita yang apa adanya bukan ada apanya. Itulah kita membangun komunikasi yang baik karena kami juga ini pemerintah, kalau ada berita-berita yang miring, itu juga merupakan catatan bagi kami, bahwa ada yang kurang benar. Semisalnya pelayanan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat belum merasa terpuaskan, kemudian diangkat oleh pers sekira itu menjadi bahan koreksi bagi kami untuk segera memperbaiki."*⁶⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan pemerintah terhadap independensi media adalah salah satu fondasi hubungan positif yang saling menguntungkan. Sikap terbuka pemerintah dalam menerima koreksi melalui kritik media menunjukkan dinamika kontrol sosial yang sehat. Fungsi media yang lebih dari sekadar peliput, tetapi juga sebagai agen pemeriksaan dan evaluasi, sangat penting dalam proses demokrasi deliberatif, dimana media menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan di masyarakat, yang kemudian dapat diperbaiki sebagai respons terhadap kritik konstruktif tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh bapak Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si.:

*"Palopo Pos itu salah satu koran terkemuka di Luwu Raya dan kita juga sudah lama menjalin kerja sama, kita juga sudah banyak terbantuan terutama menginformasikan apa yang sudah kami kerja, apa yang akan kami kerja dan itu sudah tersampaikan kepada masyarakat. termasuk juga kalau Palopo Pos ada menyentil-menyentil mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan saya kira tidak ada masalah karena pers itu dia bebas, dia juga salah satu dari pilar demokrasi, nah pilar demokrasi artinya pers yang bertanggung jawab."*⁶⁵

⁶⁴ Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si. PJ Wali Kota Palopo, Wawancara, Palopo 24 Juli 2025

⁶⁵ Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si. PJ Wali Kota Palopo, Wawancara, Palopo 24 Juli 2025

Pernyataan ini memantapkan posisi Palopo Pos sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi pemerintah, tapi juga sebagai pengawas yang bebas dan kritis terhadap kebijakan publik. Sikap pemerintah yang menerima kritik media sebagai bagian dari komunikasi transparan juga menegaskan kematangan hubungan antara media dan pemerintah yang saling menghormati independensi masing-masing.

Keputusan redaksi Harian Palopo Pos dalam menentukan berita politik merupakan hasil integrasi kompleks antara berbagai faktor internal jurnalisti termasuk faktualitas, relevansi, nilai edukasi, viralitas, dan keberimbangan dan faktor eksternal seperti tekanan politik, kebutuhan bisnis advertorial, hubungan baik dengan pemerintah, serta segmentasi audiens. Penambahan data wawancara mendalam dari berbagai narasumber internal dan eksternal, serta pembahasan yang saling terkait dan terhubung secara logis, menguatkan analisis ini. Pendekatan seperti ini menjadikan pengambilan keputusan editorial sebagai proses dinamis yang berakar pada teori *gatekeeping*, *framing*, *political economy*, etika jurnalistik, dan *audience segmentation*. Akhirnya, redaksi tampil sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab, profesional, dan adaptif terhadap tantangan operasional dan sosial politik di era media modern.

C. Pembahasan

1. Proses Penyaringan Berita Politik oleh Tim Redaksi Harian Palopo Pos pada Pemilu 2024

Proses penyaringan berita politik di Harian Palopo Pos memperlihatkan mekanisme editorial yang tidak hanya ketat dan sistematis, tetapi juga sangat responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang. Mekanisme ini dimulai dari tahap perencanaan yang matang, peliputan yang fokus, penulisan yang cermat, sampai pada penyuntingan berita oleh redaktur yang berkompeten. Tahapan tersebut menjadi wujud implementasi prinsip *gatekeeping* dalam jurnalisme, di mana media bertugas memastikan hanya informasi yang relevan, faktual, dan bermanfaat yang sampai ke publik. Hal ini penting terutama dalam konteks Pemilu 2024, di mana berita politik memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan opini dan keputusan pemilih.

Penekanan pada isu aktual yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil dan pemberdayaan nelayan pesisir, menunjukkan orientasi media pada pemberitaan yang memberdayakan masyarakat (*empowering journalism*). Hal ini selaras dengan tanggung jawab sosial media sebagai pilar demokrasi yang tidak sekadar melaporkan kejadian, tetapi juga membangun narasi positif untuk solusi masalah lokal. Penolakan terhadap berita yang bersifat fitnah atau kampanye hitam menegaskan komitmen

media pada etika jurnalistik yang menjaga keharmonisan sosial serta menghindari penyebaran konflik yang tidak konstruktif.

Koordinasi yang berkelanjutan antara reporter dan redaktur menjadi fondasi utama kualitas pemberitaan. Peran redaktur sebagai gatekeeper tidak hanya sebatas penyunting teks, melainkan juga sebagai pengawal isi berita agar tidak hanya lengkap secara faktual, tetapi juga sesuai dengan konteks dan kebutuhan audiens. Arahan agar berita diperkaya dengan narasumber lain menandakan penerapan prinsip keberimbangan dan kedalaman peliputan dua aspek krusial dalam pemberitaan politik untuk menghindari bias dan penyederhanaan berlebihan pada isu yang kompleks. Kolaborasi ini menjadi kekuatan newsroom dalam menghasilkan berita bermutu dan kredibel.

Pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp untuk proses koordinasi internal memperlihatkan adaptasi redaksi terhadap tantangan zaman yang menuntut kecepatan tanpa mengurangi ketelitian pengawasan editorial. Sistem persetujuan berita secara kolektif mengutamakan standar jurnalistik yang ketat, termasuk keberimbangan dan ketaatan pada regulasi hukum. Model kerja ini menggambarkan newsroom modern yang menggabungkan teknologi komunikasi efektif dengan etika dan tanggung jawab jurnalistik untuk menghasilkan pemberitaan yang terpercaya dan informatif.

Tahap awal perencanaan melalui rapat proyeksi menjadi dasar strategis yang menuntun jalannya peliputan dan penulisan berita. Dengan menetapkan prioritas isu yang selaras dengan misi redaksi dan kebutuhan masyarakat, reporter dapat memperoleh fokus peliputan yang tajam. Hal ini membantu mengurangi risiko bias atau berita yang kurang substansial sekaligus menjaga akurasi dan keberimbangan informasi. Pengaturan batas waktu penyeteroran berita menambah kedisiplinan internal dan memastikan kelancaran alur kerja sehingga berita selalu tersedia tepat waktu tanpa mengorbankan mutu editorial.

Secara teoretis, prosedur kerja redaksi Harian Palopo Pos dalam menentukan berita politik dapat dilihat sebagai sebuah proses *gatekeeping* sesuai dengan kerangka teori Kurt Lewin. Setiap tahapan, mulai dari penugasan liputan hingga berita siap cetak, merupakan *gate* (gerbang) di mana *gatekeeper* yakni reporter dan redaktur mengambil keputusan. Kekuatan (*force*) yang memengaruhi keputusan di setiap gerbang ini bervariasi. Pada tahapan awal, seorang reporter berperan sebagai *gatekeeper* yang menentukan sudut pandang berita berdasarkan nilai berita yang dianggap paling menarik. Kemudian, pada tahapan penyuntingan, redaktur menjadi *gatekeeper* utama yang menimbang kelayakan berita berdasarkan faktor faktualitas, relevansi, dan kebijakan redaksi. Proses ini menunjukkan bahwa berita yang sampai ke pembaca adalah hasil dari serangkaian keputusan yang dipengaruhi oleh *force* internal dan eksternal, bukan sekadar proses mekanis.

Secara keseluruhan, penerapan proses penyaringan berita politik di Harian Palopo Pos mencerminkan profesionalisme tinggi dan komitmen terhadap tugas sosial media sebagai agen informasi dan penjaga demokrasi. Dengan mengintegrasikan fungsi *gatekeeping* yang komprehensif, media mampu memberikan pemberitaan yang tidak hanya faktual dan berimbang, tetapi juga konstruktif dan edukatif. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan dinamika politik nasional yang kompleks dan cepat, khususnya pada periode pemilu, di mana kualitas media massa menjadi kunci dalam menjaga keutuhan demokrasi dan kepercayaan publik.

2. Kebijakan *Gatekeeping* dalam Penentuan Berita Politik di Harian Palopo Pos

Kebijakan *gatekeeping* yang diterapkan di Harian Palopo Pos merupakan mekanisme penting yang melibatkan berbagai aktor redaksi mulai dari reporter lapangan, redaktur, pimpinan redaksi, hingga manajemen tertinggi untuk menyaring dan menentukan berita politik yang layak diterbitkan. Proses ini menjamin agar berita yang disajikan kepada publik tidak hanya memenuhi standar kaidah jurnalistik, tetapi juga objektif dan tidak memihak. Pendekatan ini sejalan dengan teori *gatekeeping* menurut Shoemaker dan Vos yang menjelaskan bahwa proses penyaringan berita melibatkan berbagai tahapan pengurangan dan penambahan informasi sesuai visi, misi, dan nilai media. Peran redaktur dalam membaca, mengevaluasi, dan memeriksa kelengkapan serta konteks

berita menjadi langkah strategis agar informasi yang disampaikan bernilai tinggi dan relevan bagi masyarakat.

Kriteria penilaian berita politik di Harian Palopo Pos mencakup keabsahan dan kekinian sumber informasi, viralitas isu yang tengah menjadi sorotan publik, kesesuaian fakta dengan keadaan lapangan, dan pengungkapan secara lengkap berdasarkan unsur 5W + 1H. Standar ini tidak hanya menjaga kelengkapan dan akurasi berita, tetapi juga memastikan bahwa berita yang diterbitkan menarik dan mudah dipahami pembaca. Dalam konteks pemberitaan politik yang seringkali penuh dengan kontroversi dan upaya pencitraan, Harian Palopo Pos menempatkan keberimbangan dan netralitas sebagai prioritas utama, sebagaimana diatur dalam rapat redaksi dan pengawasan internal yang ketat. Hal ini menunjukkan keseriusan redaksi menjaga integritas dan profesionalisme di tengah tekanan dari pelbagai kepentingan politik dan bisnis.

Ketegasan redaksi dalam menangani tekanan dari partai politik atau tim sukses juga menonjolkan independensi media sebagai pilar demokrasi. Meskipun adanya upaya mengakomodir permintaan caleg dalam penulisan berita, Harian Palopo Pos tetap menjaga prinsip netralitas dengan tidak melakukan penyebaran informasi yang mengandung unsur berpihak atau menyinggung pihak lain. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip etika jurnalistik dan upaya menjaga kepercayaan publik agar berita yang disajikan dapat diterima sebagai sumber informasi yang kredibel.

Kebijakan seperti ini juga mengindikasikan bagaimana media mengelola tekanan eksternal dengan menjaga jarak yang sehat agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan atau bias politik.

Pelibatan pimpinan redaksi dan direktur dalam rapat penilaian berita membuktikan bahwa penyaringan berita politik dilakukan secara kolektif dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek konten dan legalitas. Validasi sumber informasi dan penerapan kode etik jurnalistik menjadi fondasi utama sebelum suatu berita dimuat. Penangguhan berita yang sumbernya tidak jelas atau belum terverifikasi, kecuali validasi dari lembaga resmi seperti BAWASLU, menunjukkan sikap hati-hati dan bertanggung jawab dalam menghadirkan berita politik yang tidak menyesatkan. Kebijakan pemberian ruang khusus untuk advertorial sebagai bagian dari kebijakan bisnis media juga dijalankan tanpa mengorbankan integritas editorial, menampilkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan etika jurnalistik.

Komitmen wartawan untuk menjaga netralitas, memberikan pelayanan informasi yang sama kepada semua pihak, dan menjalin kemitraan dengan lembaga resmi seperti KPU dan BAWASLU menggambarkan praktik jurnalistik yang profesional dan akuntabel. Hal ini mengokohkan posisi Harian Palopo Pos sebagai media yang kredibel dan instrumental dalam mendukung proses demokrasi yang transparan dan jujur. Keseluruhan kebijakan *gatekeeping* yang diterapkan di media ini tidak hanya menjadi penyaring informasi, tetapi juga pemelihara integritas

dan pilar penguatan demokrasi melalui pemberitaan politik yang berkualitas.

Berdasarkan teori *gatekeeping* oleh Shoemaker berita Harian Palopo Pos bertindak sebagai *gatekeeper* dalam setiap tahap penentuan berita. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai filter informasi, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif di mana informasi disesuaikan dengan nilai dan misi media. Dalam proses penyaringan berita politik, Harian Palopo Pos secara sengaja menambahkan konteks yang berimbang dan netralitas, sambil mengurangi unsur-unsur yang cenderung memihak atau mengandung kepentingan politik tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa *gatekeeping* bukan sekadar penghalang informasi, melainkan suatu proses konstruksi berita yang sistematis. Setiap aktor redaksi, dari reporter hingga pimpinan, berkontribusi untuk membentuk narasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga bertanggung jawab dan kredibel bagi publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Shoemaker dan Vos bahwa proses penyaringan berita adalah interaksi dinamis antara struktur organisasi media dan nilai-nilai profesionalisme yang dianut.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa mekanisme *gatekeeping* di Harian Palopo Pos berjalan secara terstruktur dan profesional dengan koordinasi yang baik antar unsur redaksi. Kombinasi standar editorial yang ketat, penguatan netralitas, dan pemanfaatan teknologi komunikasi internal memperkuat pengawasan kualitas berita. Media ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah media lokal dapat menjalankan fungsi sosial dan

demokratisnya dengan efektif, tetap relevan, dan dipercaya oleh masyarakat di tengah tekanan politik dan dinamika industri media yang terus berubah.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Redaksi dalam Menentukan Berita Politik

Keputusan redaksi dalam menentukan berita politik di Harian Palopo Pos merupakan hasil dari pertimbangan yang mendalam antara kualitas jurnalistik dan kebutuhan bisnis media. Dalam praktiknya, redaksi harus menyeimbangkan sejumlah faktor yang memengaruhi pemilihan berita, di mana setiap keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip yang melibatkan faktualitas, relevansi, viralitas, serta keberimbangan pemberitaan. Aspek ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak kalah pentingnya, seperti kebutuhan untuk mempertahankan hubungan baik dengan pihak pemerintah, partai politik, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pemberitaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah narasumber internal dan eksternal, seperti Idris Prasetiawan dan Ikhwan Ibrahim, terlihat bahwa keputusan redaksi dalam menentukan berita politik tidak hanya dipandu oleh kriteria jurnalistik, tetapi juga oleh dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi berita merupakan perpaduan antara teori jurnalistik yang sudah mapan dengan faktor-faktor yang lebih praktis dan kontemporer dalam dunia media.

Proses seleksi berita, sebagaimana dijelaskan dalam teori *gatekeeping*, mencerminkan bagaimana keputusan redaksi dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan terkait nilai berita itu sendiri. Dalam hal ini, aspek faktualitas menjadi yang utama, diikuti dengan relevansi dan daya tarik berita tersebut bagi audiens. Pimpinan Redaksi Palopo Pos, Idris Prasetiawan, menegaskan bahwa syarat utama berita yang dimuat harus sesuai dengan fakta lapangan, menarik untuk dibaca, mengandung nilai edukasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, faktor viralitas dan trending juga tidak bisa dipandang sebelah mata dalam proses ini. Berita yang sedang trending atau viral akan mendapat prioritas karena memiliki potensi untuk menarik perhatian lebih banyak pembaca. Penekanan pada viralitas ini menunjukkan bagaimana media, meskipun memiliki komitmen terhadap kualitas jurnalistik, tetap harus menyesuaikan diri dengan tren media digital yang semakin berkembang, di mana konsumsi informasi cenderung dipengaruhi oleh apa yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.

Namun, dalam upaya menjaga kualitas jurnalistik, media harus tetap menjaga keberimbangan dalam pemberitaan politik. Pernyataan dari Ikhwan Ibrahim, Editor *Palopo Pos*, mengungkapkan bahwa redaksi sangat mepartricin keberimbangan dalam setiap pemberitaan, terlebih apabila berkaitan dengan isu politik yang rawan memicu polarisasi. Untuk itu, konfirmasi dari berbagai pihak yang terlibat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa berita yang disajikan tidak hanya menarik,

tetapi juga mencerminkan berbagai perspektif yang ada. Langkah ini sejalan dengan prinsip etika jurnalistik yang berupaya menghindari bias dan distorsi dalam pemberitaan, serta teori *framing* yang menekankan pentingnya menyajikan berita secara adil dan seimbang. Keberimbangan ini penting, karena dalam dunia politik, berita yang tidak seimbang atau cenderung berpihak dapat merusak kepercayaan publik terhadap media.

Dalam konteks media di Indonesia, terdapat juga pengaruh faktor eksternal yang turut memengaruhi keputusan redaksi, seperti hubungan antara media dengan pemerintah dan partai politik. Hal ini terlihat dalam pernyataan Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si., yang menyoroti sinergi antara pemerintah dan *Palopo Pos* dalam menyebarkan informasi pembangunan serta layanan publik. Media seperti *Palopo Pos* memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kebijakan pemerintah, namun juga harus menjaga independensinya dalam menghadapi tekanan politik. Hubungan yang sehat antara media dan pemerintah ini juga menciptakan ruang bagi media untuk bertindak sebagai agen kontrol sosial, yang bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga mengkritisi kebijakan yang ada. Keseimbangan antara menjalankan tugas jurnalistik dengan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak eksternal menunjukkan bagaimana media memainkan peran ganda dalam sistem demokrasi: sebagai sumber informasi sekaligus sebagai pengawas kebijakan publik.

Segmen audiens juga mempengaruhi keputusan redaksi dalam menentukan berita politik. Dalam hal ini, segmentasi audiens menjadi penting untuk memastikan bahwa berita yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens yang berbeda-beda. Ikhwan Ibrahim mengungkapkan bahwa kedekatan geografis menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan relevansi berita politik, terutama ketika berita tersebut berfokus pada isu-isu lokal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pembaca. Pendekatan segmentasi audiens ini sejalan dengan teori *audience segmentation* yang mengajarkan bahwa media harus mampu menyesuaikan konten dengan karakteristik dan kebutuhan audiensnya, agar berita yang disajikan dapat lebih diterima dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pembaca.

Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *gatekeeping* di Harian Palopo Pos menunjukkan bahwa proses ini dipengaruhi oleh berbagai level, sebagaimana dijelaskan dalam model hierarki Shoemaker & Reese. Pada level organisasi, kepentingan bisnis dan kebijakan redaksi menjadi faktor dominan, seperti penempatan berita advertorial di halaman strategis. Namun, temuan ini juga menunjukkan adanya pengaruh kuat dari level ekstra-media, khususnya melalui saluran (*channel*) komunikasi dengan pihak-pihak di luar redaksi. Kedekatan Harian Palopo Pos dengan KPU dan Bawaslu, misalnya, menjadi saluran penting untuk memverifikasi kebenaran informasi, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan redaksi. Hal ini memperkaya temuan penelitian Marcelino

Pahlevi yang juga menyoroti peran media dalam politik lokal, namun penelitian ini secara spesifik menunjukkan bagaimana interaksi personal dan kelembagaan menjadi channel krusial dalam menentukan alur berita. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan temuan terdahulu sembari menambahkan aspek unik dari dinamika media cetak lokal.

Secara keseluruhan, keputusan redaksi dalam memilih berita politik di *Palopo Pos* adalah hasil dari proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Kualitas jurnalistik tetap menjadi prioritas utama, namun media juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti viralitas, kedekatan geografis, dan kebutuhan bisnis. Selain itu, upaya menjaga netralitas dan integritas dalam pemberitaan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh redaksi, terutama di tengah tekanan politik yang terus berubah. Dengan demikian, media harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-politik yang ada, sambil tetap mempertahankan komitmennya terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik yang mendasari profesi mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa *Palopo Pos* memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasukan dari iklan untuk menunjang keberlangsungan operasional perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi arah kebijakan redaksi, khususnya dalam menentukan berita yang akan di publikasikan. Temuan tersebut mendukung hipotesis penelitian yang

menyatakan bahwa kedekatan antara jurnalis dan narasumber, keterbatasan sumber daya, serta tekanan dari berbagai pihak sering kali memengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan. Ketergantungan terhadap iklan menjadi salah satu bentuk tekanan dari pihak luar yang berpotensi menurunkan tingkat independensi redaksi dalam melakukan proses *gatekeeping*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian terbukti benar, karena faktor-faktor eksternal seperti kepentingan ekonomi dan hubungan dengan pihak pengiklan terbukti berpengaruh terhadap proses penentuan berita di Harian Palopo Pos.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses gatekeeping yang dilakukan oleh Harian Palopo Pos adalah dengan menerapkan seleksi berita politik secara ketat berdasarkan nilai berita, relevansi, dan kepentingan publik. Mekanisme ini memastikan bahwa dari banyaknya informasi yang masuk, hanya berita yang memenuhi kriteria.
2. Kebijakan redaksi Harian Palopo Pos dalam menyeleksi berita politik berpegang pada pertimbangan etika, dan objektivitas. Redaksi berkomitmen untuk menjaga independensi dan kualitas pemberitaan, meskipun dihadapkan pada tekanan dari tokoh politik. Komitmen ini mencerminkan integritas penting dalam jurnalisme lokal.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan redaksi dalam menentukan berita politik meliputi faktor internal seperti pengalaman dan nilai-nilai jurnalisme, serta faktor eksternal seperti tekanan dari aktor politik dan pengiklan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan studi serupa:

1. Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif terhadap kebijakan redaksi di satu media lokal, Harian Palopo Pos. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh media lokal. Selain itu, penelitian ini tidak secara spesifik membandingkan kebijakan *gatekeeping* Harian Palopo Pos dengan media cetak lain atau media daring, sehingga ruang perbandingan dan variasi praktik belum sepenuhnya terungkap.
2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:
 - a. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi komparatif dengan membandingkan kebijakan *gatekeeping* berita politik antara Harian Palopo Pos dan media cetak lain di wilayah yang sama, atau membandingkannya dengan media daring. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika *gatekeeping* di berbagai platform media.
 - b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperdalam studi mengenai pengaruh platform media sosial terhadap proses *gatekeeping* berita politik. Temuan kecil dalam penelitian ini menunjukkan adanya pertimbangan viralitas isu, yang membuka peluang untuk meneliti

bagaimana *gatekeeper* media lokal beradaptasi dengan tren informasi yang berkembang pesat di media sosial.

- c. Fokus penelitian dapat diperluas dari hanya kebijakan redaksi, menjadi analisis mendalam tentang dampak dari kebijakan *gatekeeping* tersebut terhadap persepsi dan preferensi pembaca dalam mengonsumsi berita politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, Ria. "Content Analysis of Religious Articles in the Opinion Column in the Palopo Pos Daily Newspaper." *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 10, no. 2 (2022): 1570–82. <https://doi.org/10.24256/ideas.v10i2.3447>.
- AMIR, MUH. FADHLI FEBRIAN. "Strategi Bisnis Media : Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos." *Universitas Hasanuddin*, 2022.
- "Analisis Gatekeeper Dalam Pemilihan Informasi Viral Media Sosial Di Tribun Sumsel" 02, no. 02 (2024): 308–19. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>.
- Arnus, Sri Hadijah, Wahyuni Husain, and Dini Asriani. "Online Media Literacy among Gen Z in Kendari City in the Post Truth Era." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 1 (2023): 65–74. <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i1.7806>.
- Aruguete, Natalia, Ernesto Calvo, and Tiago Ventura. "News Sharing, Gatekeeping, and Polarization: A Study of the #Bolsonaro Election." *Digital Journalism* 9, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1852094>.
- Assaad, Andi Sukmawati, and Baso Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 317–34. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.
- Beno, Silen, and Yanti. "ANALISIS PROSES GATEKEEPING PADA PEMBERITAAN AKUN MEDIA SOSIAL." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Celina Natalia Sitorus, Tavana Yurens, dan Isbimayanto. "GATEKEEPING DALAM PRODUKSI BERITA PADA HALAMAN UTAMA DI MEDIA CETAK HARIAN DISWAY." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Chusna, Rahma Junatus. "Konstruksi Makna Pertemuan Prabowo Dan Surya Paloh Pasca Pengumuman Hasil Pilpres 2024 Dalam Framing Media Online" 13, no. 4 (2024): 1141–54. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12797>.
- Darza, Sugeng Rabiul. "GATEKEEPER DALAM PRODUKSI BERITA POLITIK MEDIA RADARBOGOR . ID," 2024.
- F, Moh. Anang Ma'ruf. "FUNGSI METAFORA POLITIK DALAM MEDIA MASSA," no. June (2022): 1–23.

- Fecke, Malin, Ada Fehr, Daniela Schlütz, and Arne Freya Zillich. "The Ethics of Gatekeeping: How Guarding Access Influences Digital Child and Youth Research." *Media and Communication* 10, no. 1 (2022): 361–70. <https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4756>.
- Husain, W. "Kontrol Sosial Harian Palopo Pos Dalam Mewujudkan Good Governance Di Luwu Social Control of Palopo Pos Daily Newspaper in Realizing Good" *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2011): 283–96. <https://core.ac.uk/download/pdf/230413033.pdf>.
- Husain, Wahyuni, Sapruddin Sapruddin, Fauziah Astrid, Saifur Rahman, and Alfatiha Aenayah. "Pemberdayaan Literasi Media Bagi Pemuda Di Kelurahan Purangi Kota Palopo." *Islamic Management and Empowerment Journal* 5, no. 2 (2023): 119–34. <https://doi.org/10.18326/imej.v5i2.119-134>.
- Islami, Jihadul, and Ilham Zitri. "Pengaruh Media Massa Terhadap Perilaku Pemilihan Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Mataram." *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2023): 93–109. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.223>.
- Ismail, Adnan Rinaldi. "Analisis Kualitas Layana Kuri Dan Logistik Pada Pengguna Pengiriman Paket PT.Pos Indonesia Di Kota Palopo." *Manajemen Bisnis*, 2023, 18–29.
- Ismawati, Arnita, Tri Yatno, Adi Nugroho, and Susanto Putro. "Gatekeeping Perspektif Bruce Westle and Malcolm Mclean Dalam Produksi Berita Online Www.Wonogirikab.Go.Id" 7, no. 2 (2024): 388–99.
- Krisnawan, Firman Anggara, and Faris Budiman annas. "Analisis Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Media the Iconomics." *Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2024): 74–89. <https://doi.org/10.51353/kvg.v5i1.963>.
- PRAYOGA, RUDI GUSTI. "ANALISA GATEKEEPING DALAM MEMBERIKAN INFORMASI DANPARTISIPASI PUBLIK PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @beritamagetan." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.
- Salonen, Margareta, Veera Ehrlén, Minna Koivula, and Karoliina Talvitie-lamberg. "Post-Publication Gatekeeping Factors and Practices: Data, Platforms, and Regulations in News Work." *Media and Communication* 11, no. 2 (2023): 367–78. <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6486>.
- Salsabila, Dinda Annaf. "MENGUASAI NARASI MELALUI PROSES

KREATIF DI RUANG REDAKSI,” 2024.

Shaufa, Shania. “GATEKEEPING INEWS.ID DALAM PEMBERITAAN TENTANG PEMBATAHAN IBADAH DI MASJID” 2, no. 2 (2023): 401–4. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3_46.

Simatupang, Yunita. “DINAMIKA POLITIK DAN PILKADA DI KOTA KENDARI: Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Kampanye Politik Lokal” 7, no. 1 (2024): 439–47.

Tyas Utami, Isti Purwi, and Syaharani Putri. “Gatekeeping Pemberitaan Pembunuhan Pada Harian Poskota.Co.Id.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2023): 43–60. <https://doi.org/10.36914/jikb.v9i1.998>.

Yoteni, Ariella A, Neng Deasy Nurlatifah, and Reynaldi Pramana. “Peran Media Massa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia.” *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 72–78. <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i9.158>.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos:

- a. Bagaimana alur kerja redaksi dalam menentukan berita politik yang layak terbit selama pemilu 2024? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaringan berita politik di Harian Palopo Pos?
- b. Apa yang menjadi standar editorial yang digunakan dalam menilai berita politik?
- c. Bagaimana Redaksi mastikan bahwa berita politik yang disaring tetap netral, faktual dan tidak memihak?
- d. Bagaimana sikap Redaksi ketika mendapat tekanan dari partai politik atau tik sukses dalam proses penyaringan berita politik?
- e. Apa syarat utama agar berita politik Harian Palopo Pos khususnya pada pemilu 2024?
- f. Apakah harian Palopo Pos memiliki kebijakan khusus terhadap berita berbayar (advetorial politik) selama pemilu 2024?
- g. Ketentuan apa yang ditetapkan oleh Palopo Pos dalam menjalankan tugas?
- h. Apa tantangan dalam menjaga objektivitas dan integritas pemberitaan politik?
- i. Bagaimana kondisi periklanan selama pemilu, apakah ada peningkatan?

2. Editor Harian Palopo Pos:

- a. Bagaimana alur kerja dalam menyaring berita politik sebelum diterbitkan?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam proses gatekeeping pada harian Palopo Pos?
- c. Apakah masih ada rapat khusus dalam menentukan berita politik yang layak tayang?
- d. Bagaimana peran editor dalam menilai kelayakan isi dan sumber berita politik?
- e. Apa kriteria utama dari editor dalam proses penginputan berita?
- f. Apa kriteria utama dalam memilih berita politik selama pemilu 2024?
- g. Apakah redaksi menangani berita politik yang mengandung unsur keberpihakan?
- h. Apa pedoman atau standar jurnalistik yang digunakan Palopo pos dalam menerbitkan berita politik?
- i. Jika ada berita yang kurang jelas, bagaimana cara menghadapinya?
- j. Adakah pihak yang komplek terhadap berita yang sudah rilis?

3. Reporter/ Wartawan Politik:

- d. Bagaimana alur kerja reporter dalam meliput dan mengajukan berita Politik ke tim redaksi?
- e. Bagaimana cara reporter mendapatkan arahan khusus saat meliput isu-isu politik di masa pemilu?
- f. Dalam proses penyaringan berita politik, apakah wartawan tetap dilibatkan?
- g. Selama pengalaman wartawan di lapangan apakah ada berita yang tertolak atau diminta revisi saat diberikan kepada redaksi?

- h. Apa yang menjadi batasan tertentu diperhatikan saat meliput isu politik terutama terkait sentivitas atau netralitas?
 - i. Apakah ada tekanan dari pihak eksternal yang memengaruhi proses penyaringan berita politik?
 - j. Apa yang menjadi titik perbedaan antara berita politik saat pemilu dan di luar masa pemilu?
 - k. Faktor apa yang memengaruhi berita itu penting untuk di informasikan ke editor setelah mendapat berita di lapangan?
 - l. Apa prinsip yang dimiliki wartawan dalam menjalankan tugasnya agar tetap memiliki berita yang berimbang, independen, dan netral?
 - m. Apa tanggapan wartawan terkait berita politik yang tidak melanggar aturan kampanye?
 - n. Terkait pembatasan berita politik saat pemilu 2024, apa tanggapan wartawan politik harian Palopo Pos?
 - o. Bagaimana kerja sama antara media Palopo pos dengan KPU dan Bawaslu?
4. Narasumber Eksternal (Tokoh Politik)
- a. Bagaimana penilaian Bapak terhadap Palopo Pos selama pemilu 2024?
 - b. Bagaimana bentuk klarifikasi bapak terkait proses penerbitan berita di Harian Palopo Pos?
 - c. Apakah berita politik selama pemilu 2024 di Palopo Pos sudah seimbang?
 - d. Apa yang menjadi kelebihan media Harian Palopo Pos?

5. Tambahan Pendukung Eksternal Media (Pemerintah Kota Palopo: PJ Walikota Kota Palopo

- a. Mengenai berita Palopo Pos, bagaimana penilaian Bapak selaku PJ Walikota Kota Palopo?
- b. Apakah ada berita Palopo Pos yang rilis dan Wali Kota merasa dirugikan?
- c. Bagaimana pandangan Bapak selaku PJ Wali Kota terhadap Palopo Pos?



Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
 Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpptsp@palopkota.go.id, Website : http://dpmpptsp.palopkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 500.16.7.2/2025.0778/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberian Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: SRI ANDRIANI PUTRI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Desa Salulino, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1901040001

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

GATEKEEPING DALAM MENENTUKAN BERITA POLITIK (STUDI KEBIJAKAN REDAKSI HARIAN PALOPO POS)

Lokasi Penelitian	: PALOPO POS KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 11 Juni 2025 s.d. 11 September 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cc. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 13 Juni 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19950211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sistem Tanda Elektronik
 yang memenuhi syarat Sistem Tanda Elektronik (SSTE) Badan Elektronik Signatur (BESN)

Lampiran 3

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1: Wawancara bersama PJ Wali Kota Palopo Bapak Dr. H. FIRMANZA . DP, SH., M.Si di Kantor Wali Kota Palopo pada tanggal 24 juli 2025, saat Waktu istirahat kerja Bapak PJ Wali Kota Palopo.



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Arsul S.Pd, Wartawan Harian Palopo Pos, Sedang melakukan wawancara di Warkop pada Tanggal 7 Juli 2025, mengenai proses redaksi dan kebijakan editorial terkait pemberitaan politik sebagai bagian dari pengumpulan data penelitian tentang *gatekeeping* berita politik



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Alfri Jamil, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palopo, Wawancara di lakukan di Kantor DPRD Kota Palopo Tanggal 9 Juli 2025, mengenai peran dan pandangan legislatif terkait pemberitaan politik di media lokal, sebagai bagian dari pengumpulan data penelitian tentang *gatekeeping* berita politik.



Gambar 4: Melakukan wawancara dengan Bapak Ikhwan Ibrahim selaku Pemimpin Redaksi Harian Palopo Pos, wawancara di lakukan di Kantor Harian Palopo Pos pada tanggal 7 Juli 2025, mengenai kebijakan editorial dan proses pengambilan keputusan dalam penentuan berita politik sebagai bagian dari pengumpulan data penelitian tentang *gatekeeping* dalam pemberitaan politik.



Gambar 5: Melakukan wawancara dengan Bapak Idris Prasetiawan S.Kel, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos yang berlokasi di Kantor Harian palopo Pos pada tanggal 11 Juli 2025, mengenai kebijakan editorial serta proses pengambilan keputusan dalam penentuan berita politik sebagai bagian dari pengumpulan data penelitian tentang *gatekeeping* dalam pemberitaan politik.



Lampiran 4

Riwayat Hidup

Sri Andriani Putri, lahir di Borai, pada Kamis, tanggal 12 Juli 2002. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan seorang ayah yang bernama Nasar dan ibu Jamunia. Saat ini penulis beralamat di dusun Salulino, desa Salulino, kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 312 Salulino, kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 3 Lamasi hingga tahun 2016. Selanjutnya di tahun yang sama penulis menempuh Pendidikan di SMAN 2 Luwu dan lulus pada tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni, yaitu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Selama berstatus sebagai mahasiswa, peneliti bukan hanya aktif di kelas, tetapi peneliti juga aktif di berbagai organisasi. Adapun organisasi tersebut yaitu HMPS KPI UIN Palopo tahun 2021-2022, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Luwu, Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IMWAL). Email sriandrianiputri5121@gmail.com.